



KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

Dr. Sri Mulyani Indrawati
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

DEPOK, 27 NOVEMBER 2019





Teori
Kebijakan
Fiskal

Kebijakan
Fiskal di
Indonesia



Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal dan Fungsi Alokasi

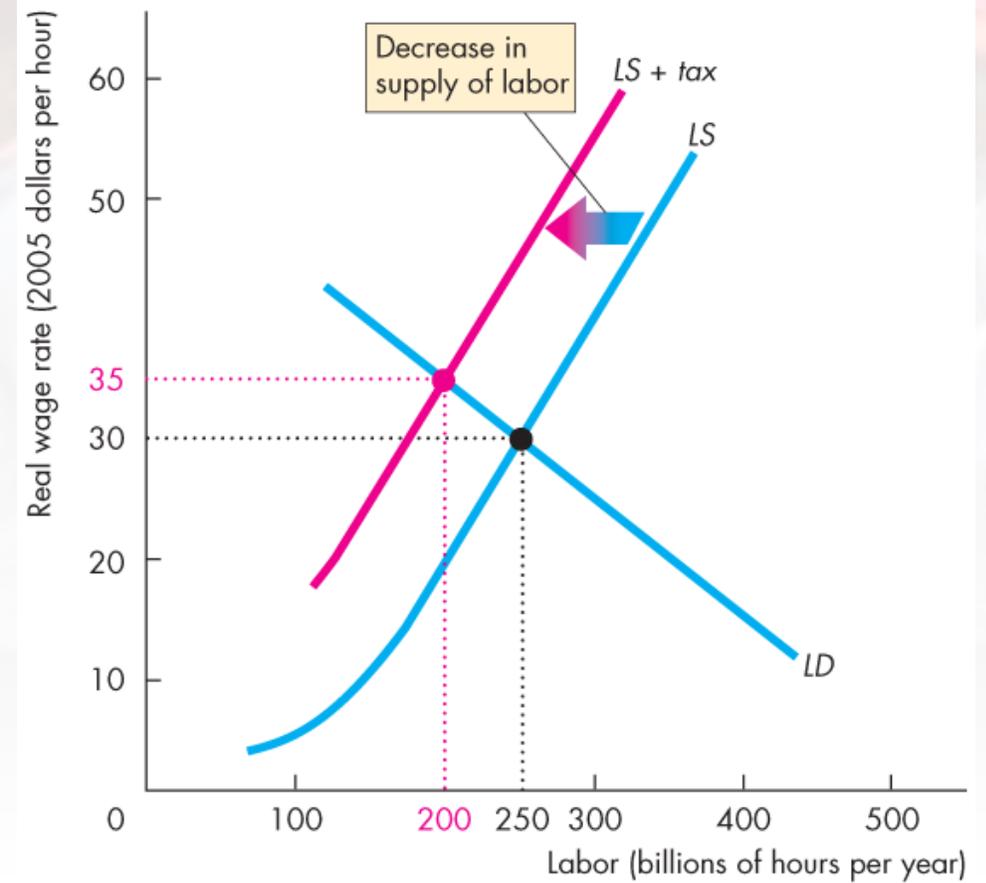
Dampak Kebijakan Fiskal Pada Sisi *Supply-Side* (1)



- Keb. Fiskal berpengaruh secara signifikan pd tingkat pengangguran, potensi PDB, dan *aggregate supply* – (*supply-side effects*).
- Pengenaan Pajak penghasilan mempengaruhi tingkat pengangguran dan potensi PDB.

Full Employment & Potential GDP

- Gambar disamping mengilustrasikan dampak pengenaan PPh dalam pasar tenaga kerja (*labor market*).
- *Supply* tenaga kerja berkurang karena pajak menurunkan *after-tax wage rate*.

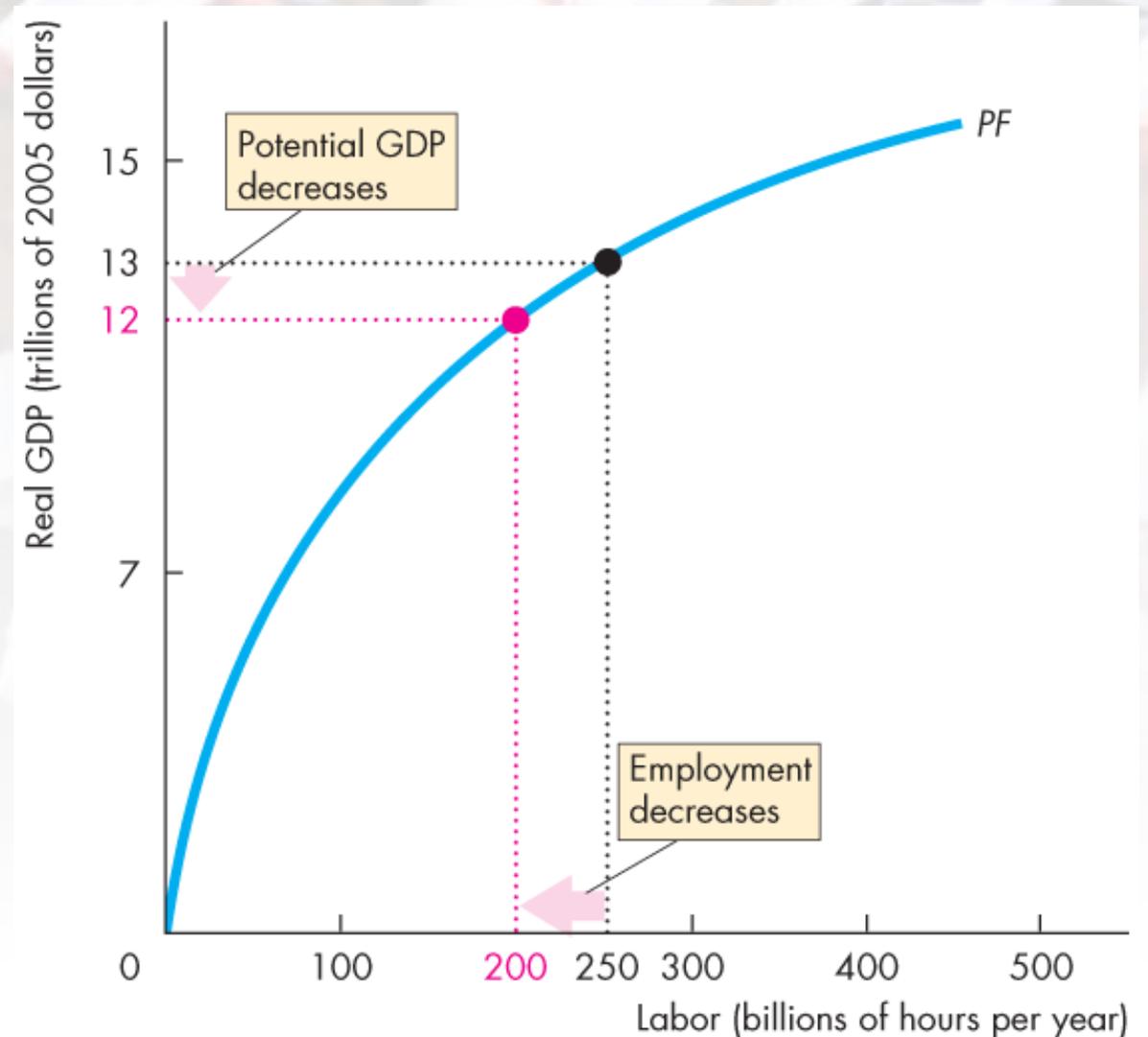


(a) Income tax and the labor market

Dampak Kebijakan Fiskal Pada Sisi *Supply-Side* (2)



- Jika jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan berkurang, maka potensi PDB juga akan berkurang.
- Efek pada sisi penawaran (*supply-side*) dari kenaikan PPh adalah penurunan PDB potensial dan sekaligus penurunan *aggregate-supply*.



(b) Income tax and potential GDP

Dampak Kebijakan Fiskal Pada Sisi *Supply-Side* (3)

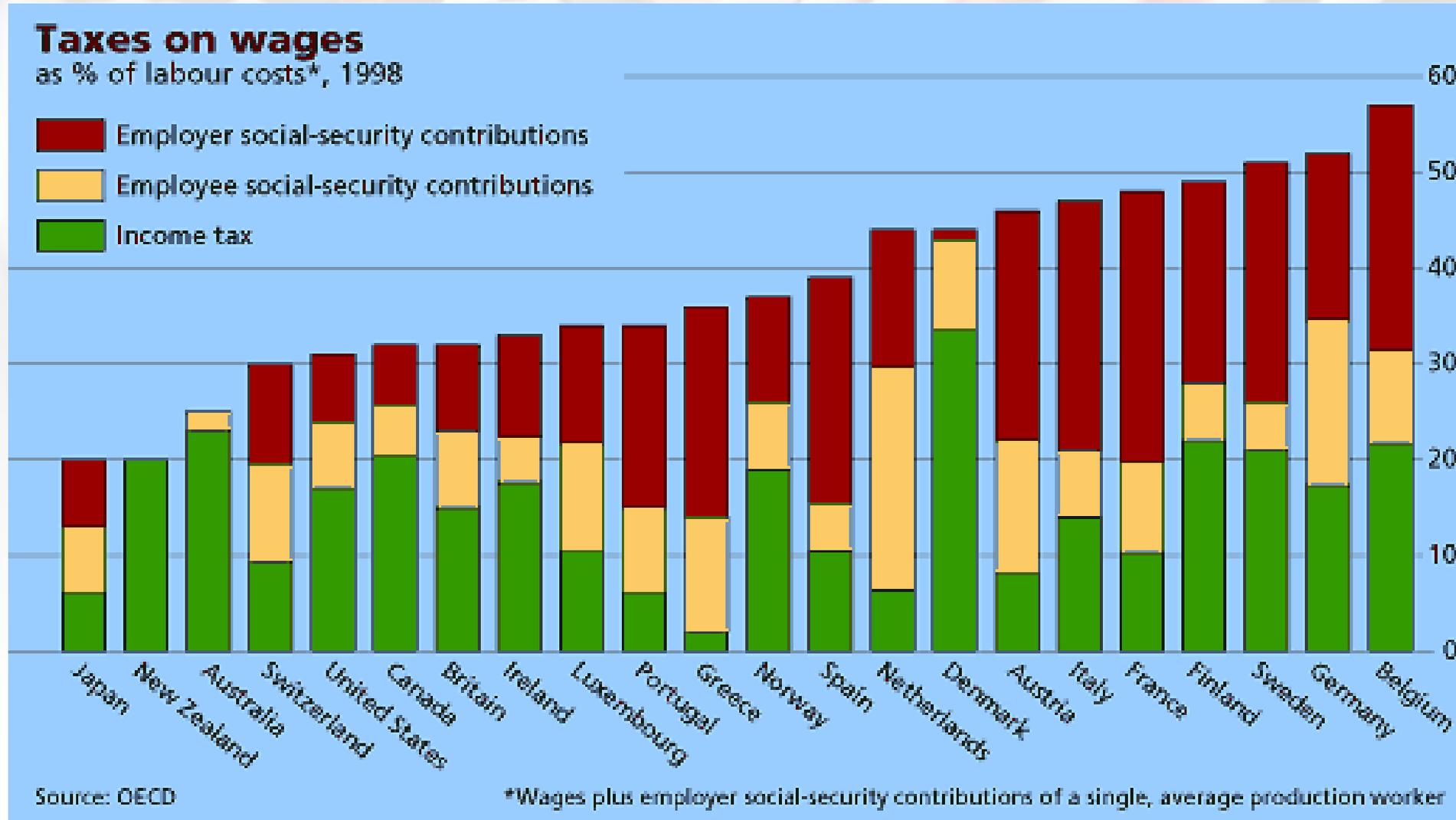


Dampak Pengenaan Pajak Pada *Consumption Expenditure* dan Terjadinya **Tax Wedge**



- Pengenaan pajak pada **consumption expenditure** akan menciptakan *tax wedge*.
- Pengenaan pajak atas konsumsi **meningkatkan harga** yang harus dibayar konsumen untuk barang dan jasa yang akan dikonsumsi, serupa dengan efek potongan pada *real wage rate*.
- Jika tarif PPh adalah 25% dan tarif dari *consumption expenditure* adalah 10%, setiap 100 rupiah yang diterima hanya akan mampu barang atau jasa sebesar 65 rupiah
- Tingkat *tax wedge* adalah sebesar 35 %.

Dampak Keb. Fiskal Pada Sisi *Supply-Side* (3)



Dampak Keb. Fiskal Pada Sisi *Supply-Side* (4)



Pengenaan Pajak dan Dampaknya Terhadap Insentif untuk Menabung dan Investasi



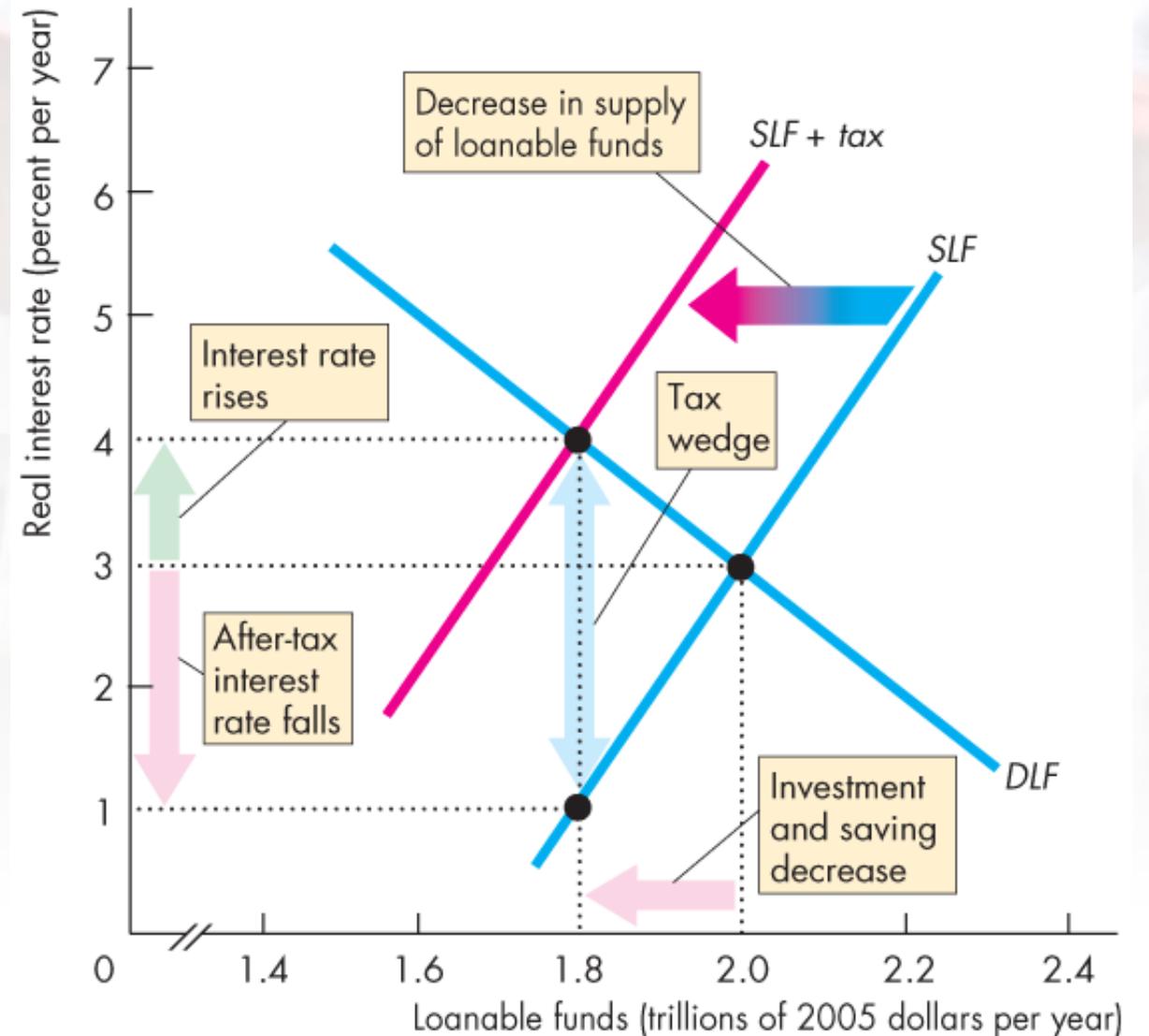
- Pengenaan pajak pada *capital income* akan **menurunkan jumlah *saving & Investment*** serta menurunkan tingkat pertumbuhan riil dari PDB.
- Tingkat suku bunga (*interest rate*) yang mempengaruhi *saving & Investment* adalah *real after-tax interest rate*.
- *Real after-tax interest rate* akan mengurangi PPh atas penghasilan bunga dari *real interest*.
- Pajak bergantung pada *nominal interest rate*. Berkaitan dengan hal tersebut, pajak efektif atas penghasilan dari *bunga* bergantung pada tingkat inflasi.

Dampak Kebijakan Fiskal Pada Sisi *Supply-Side* (5)

Dampak Pengenaan Pajak Pada *Capital Income*:



- Pengenaan pajak akan menurunkan *supply* dari dana pinjaman yang tersedia di pasar (*loanable funds*).
- Sebagai dampaknya kegiatan investasi dan menabung akan turun.
- *Tax Wedge* akan tercipta diantara *real interest rate* & *real after-tax interest rate*.



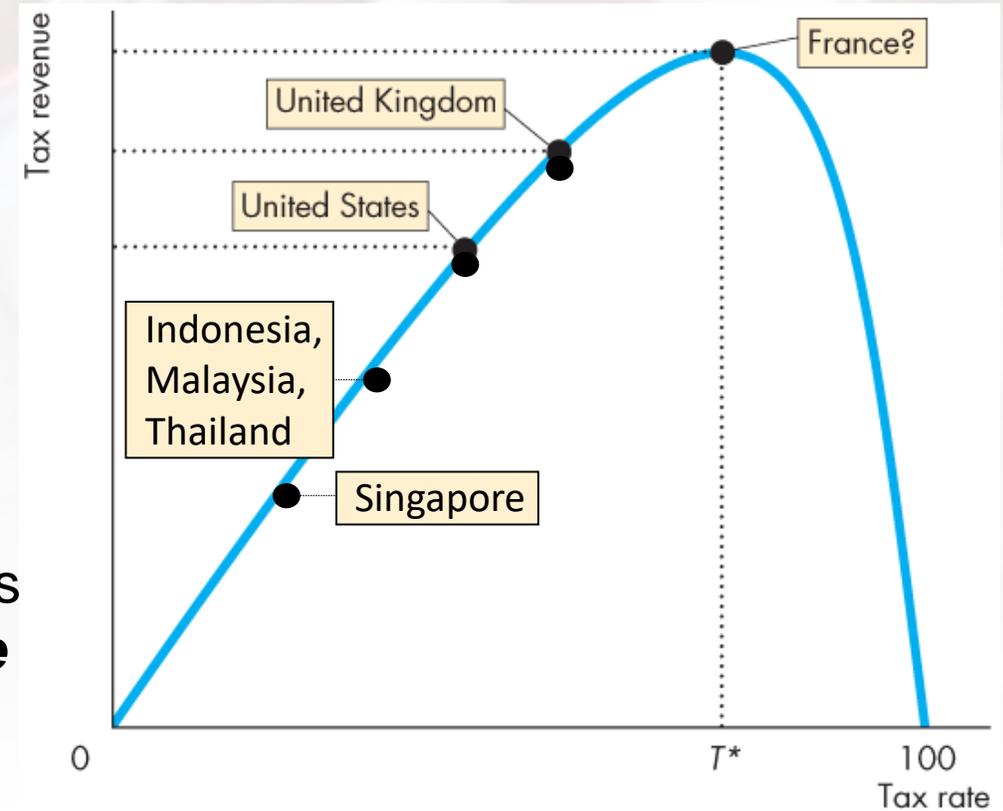
Dampak Kebijakan Fiskal Pada Sisi *Supply-Side* (6)



Penerimaan Pajak dan *Laffer curve*:

- Hubungan antara tarif pajak (*tax rate*) dengan jumlah pajak yang dikumpulkan dapat digambarkan dengan **Laffer Curve**.

- Pada *tax rate* T^* tingkat penerimaan pajak berada pada *level* yang optimal.
- Untuk *tax rate* di bawah T^* , maka kenaikan *tax rate* akan meningkatkan penerimaan pajak.
- Untuk *tax rate* di atas T^* , kenaikan *tax rate* akan menurunkan penerimaan pajak.



Efek Generasional dari Kebijakan Fiskal

- ❓ Apakah defisit anggaran merupakan beban bagi generasi mendatang?
- ❓ Apakah defisit anggaran hanya merupakan beban bagi generasi mendatang?
- ❓ Bagaimana dampak defisit dalam bidang *Social Security Fund*?
- ❓ Seberapa penting untuk mengetahui siapa pembeli Obligasi Pemerintah yang diterbitkan untuk membiayai defisit anggaran?
- ❓ Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita akan menggunakan metode yang disebut sebagai ***generational accounting***.
-  ***Generational Accounting*** merupakan sistem akuntansi yang mengukur beban pajak seumur hidup dan manfaatnya untuk setiap generasi.

Efek Generasional Kebijakan Fiskal (2)



Generational Accounting & Present Value

- **Pajak dibayar** oleh orang dengan pekerjaan, dan *Social Security Benefit* dibayarkan setelah mereka pensiun.
- Untuk membandingkan nilai dari uang pada suatu waktu (masa berkerja) dengan masa mendatang (masa pensiun), kita menggunakan konsep "**Present Value**".
- **Present Value** merupakan jumlah uang yang apabila diinvestasikan hari ini akan setara dengan suatu nilai tertentu di masa mendatang dengan memperhitungkan tingkat suku bunga

Contoh Penerapan *Present Value*

- Jika suku bunga 5% per tahun Uang senilai \$1.000 yang diinvestasikan saat ini, nilainya akan menjadi \$11.467 setelah 50 tahun.
- *Present value* (hari ini, tahun 2019) dari uang senilai \$11.467 di tahun 2069 adalah sebesar \$1.000.



Efek Generasional Kebijakan Fiskal (3)



The Social Security Time Bomb: Kasus Di Amerika Serikat

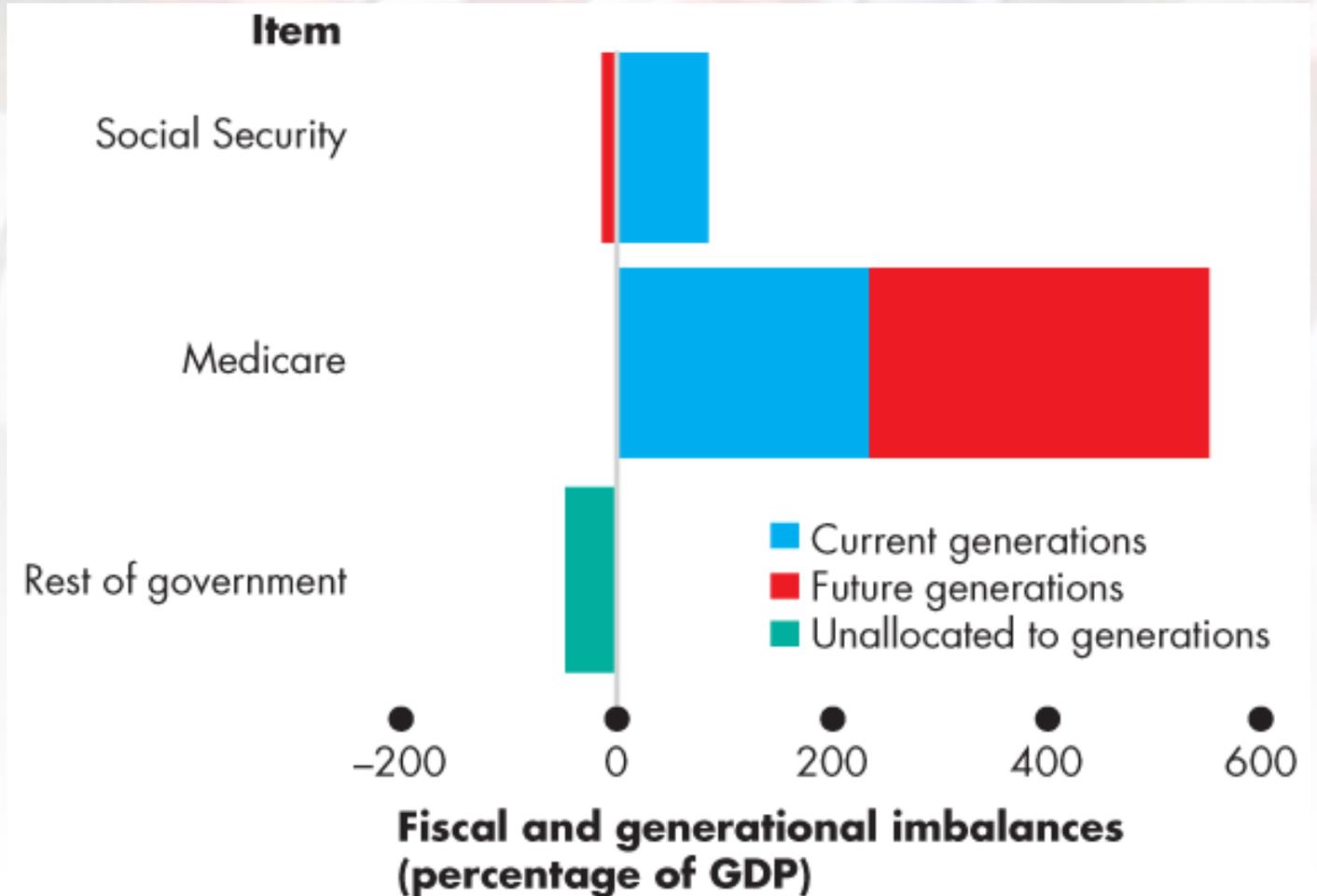
- Dengan menggunakan *generational accounting* dan *present values*, ekonom menyimpulkan bahwa Pemerintahan Federal Amerika Serikat menghadapi *Social Security Time Bomb*.
- Di tahun 2008, generasi **Baby Boomers** pertama mulai mengumpulkan *Social Security Pensions* dan di tahun 2011 mereka mulai berhak menerima *medicare benefits*.
- Mulai tahun 2030, semua **Baby Boomers** akan mencapai usia pensiun dan sebagai dampaknya populasi yang akan menerima bantuan *social security* akan berlipat ganda.
- Berdasarkan Undang-Undang *Social Security* yang berlaku, Pemerintahan Federal AS memiliki kewajiban untuk membayar pensiun dan *medicare benefits* sesuai dengan jumlah yang ditentukan.
- Untuk menilai secara rinci berapa biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Federal AS, ekonomi menggunakan konsep yang disebut **Fiscal Imbalance**.
- **Fiscal imbalance** adalah *present value* dari kewajiban dan komitmen Pemerintah Federal AS untuk membayar *benefit* dari *social security* dikurangi nilai **present value** dari penerimaan pajak.
- **Gokhale and Smetters** memperkirakan bahwa nilai **fiscal imbalance** adalah sebesar \$79 triliun di tahun 2010 — 5,8 kali lebih besar dari nilai total produksi AS tahun 2010 sebesar \$13,6 triliun.

Efek Generasional Kebijakan Fiskal (4)

Generational Imbalance



- Merupakan pemisahan ketidakseimbangan fiskal antara generasi saat ini dan generasi mendatang.
- Generasi saat ini akan menikmati tingkat pajak saat ini dan segala *benefit* yang didapat.
- Grafik disamping menunjukkan skala dari *fiscal imbalance*.



Efek Generasional Kebijakan Fiskal (5)

United States International Debt



- Berapa banyak investasi yang telah dibayar oleh warga AS akibat melakukan pinjaman dari luar negeri?
- Berapa jumlah utang Pemerintah AS yang dipegang investor luar negeri?
- Pada Juni 2010, AS memiliki net utang luar negeri sebesar \$9,5 triliun. Dari jumlah itu \$4 triliun adalah utang Pemerintah.
- Perusahaan di AS menggunakan dana luar negeri sebesar \$4,7 triliun.
- Sekitar 2/3 dari utang Pemerintah AS dipegang oleh investor asing.

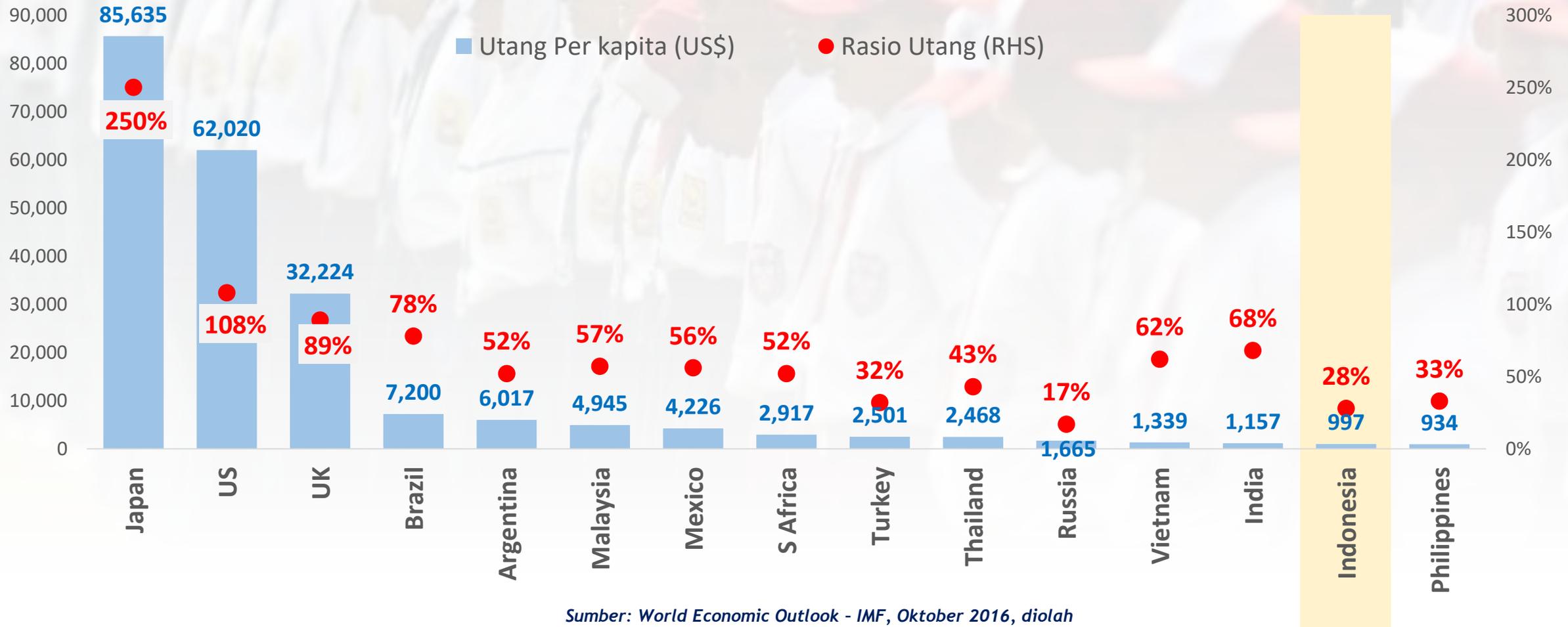
TABLE 30.2 What the United States Owed the Rest of the World in June 2010

	\$ trillions
(a) U.S. liabilities	
Deposits in U.S. banks	0.6
U.S. government securities	4.0
U.S. corporate bonds	2.4
U.S. corporate equities	2.3
Other (net)	<u>0.2</u>
Total	<u>9.5</u>
(b) U.S. government securities	
Held by rest of world	4.0
Held in the United States	<u>2.0</u>
Total	<u>6.0</u>

Source of data: Federal Reserve Board.

Efek Generasional Kebijakan Fiskal (6)

Perbandingan Tingkat Utang (Rasio terhadap PDB dan tingkat perkapita)



Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2016, diolah



Teori Kebijakan Fiskal

**Kebijakan Fiskal Sebagai
Instrumen Pengelolaan *Demand***

APBN dan Belanja Pemerintah

$$GDP = C + I + G + X - M$$

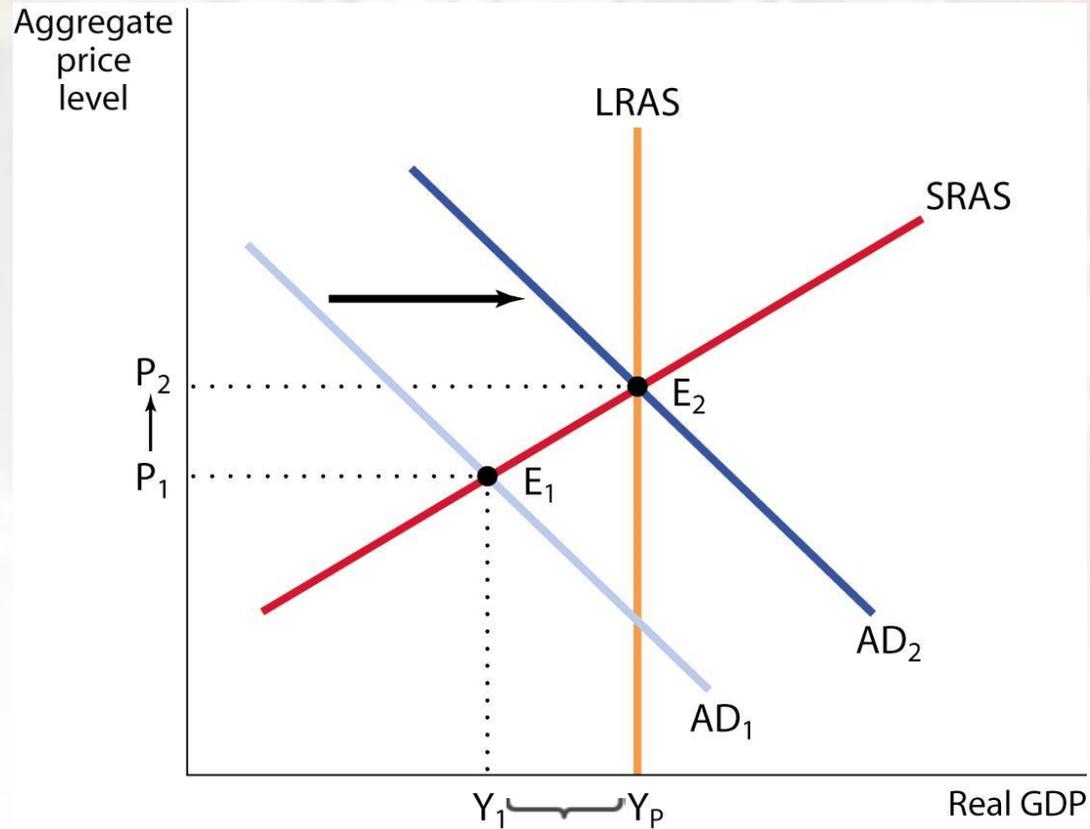


Kebijakan Fiskal:

“Penggunaan pajak, transfer Pemerintah, dan belanja Pemerintah untuk barang dan jasa guna menggeser kurva permintaan agregat (*aggregate demand curve*)”.

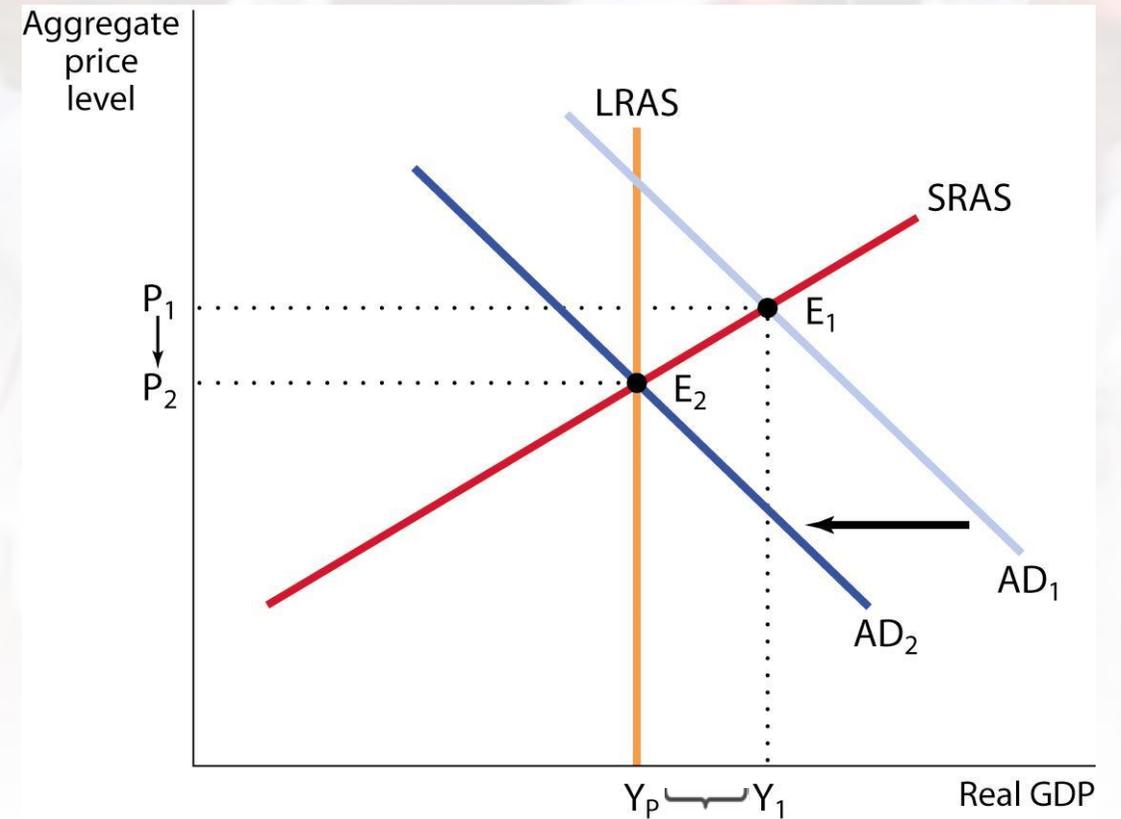
Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Keb. Fiskal Ekspansif
Meningkatkan *Aggregate Demand*.



Recessionary gap

Keb. Fiskal Kontraktif
Mengurangi *Aggregate Demand*.



inflationary gap

Stimulus Fiskal



Stimulus Fiskal

“Penggunaan **kebijakan fiskal** untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja”



2 Jenis Stimulus Fiskal



- *Automatic Fiscal Stimulus*



- *Discretionary Fiscal Stimulus*



- **Automatic fiscal stimulus** adalah keb. fiskal yang secara otomatis terjadi karena dipicu kondisi ekonomi tanpa campur tangan Pemerintah.
- **Discretionary fiscal stimulus** terjadi akibat kebijakan yang diambil oleh Pemerintah/Kongres.

Peran Pemerintah Dalam Siklus Bisnis dan Respon Swasta

	DAMPENING MECHANISMS OFFSET SHOCKS (STABILISING)	AMPLIFYING MECHANISMS REINFORCE SHOCKS (MAY BE DESTABILISING)
PRIVATE SECTOR DECISIONS (UNIT 12)	<p>Households try to smooth consumption when their income fluctuates. Their behaviour reflects the diminishing marginal utility of consumption (Unit 3 & 11). During a boom, as unemployment falls, the real wage tends to rise (Unit 6). This reduces firms' expected profits discouraging investment, dampening the upswing (and conversely for a downturn).</p>	<p>Households unable to borrow because of credit rationing by banks (Unit 11), or who don't save because of impatience, alter spending when income changes. This behaviour is summarised by a multiplier greater than one for an economy with underutilised resources.</p> <p>Bubbles and financial accelerator mechanisms (Units 9 & 11) lead to instability. Investment decisions respond positively to increased capacity utilisation, which reinforces the upswing of a cycle, and conversely in the downswing.</p>
GOVERNMENT AND CENTRAL BANK DECISIONS (UNITS 13 & 14)	<p>By funding unemployment benefits, the government helps to smooth consumption and aggregate demand. Governments use deliberate stabilisation policy, which includes, monetary and fiscal policy instruments to dampen fluctuations.</p>	<p>Poor macroeconomic policymaking produces instability in the economy. Example (Unit 13): the attempt to balance the government's budget in a recession reinforces the recession.</p> <p>Example (Unit 14): the attempt to respond to an oil shock with fiscal or monetary stimulus results in stagflation (rising unemployment and inflation).</p>

Peran Pemerintah Dalam Siklus Bisnis dan Respon Swasta

1. *The size of government.* Unlike private investment, government spending on consumption and investment is stable. Spending on health and education, which are usually the two largest government budget items, does not fluctuate with capacity utilisation or move with business confidence. As we have also seen, a higher tax rate also dampens fluctuations because it reduces the size of the multiplier.
2. *The government provides unemployment benefits.* As we have seen, households can save to smooth fluctuations in income but, for individuals, the probability of job loss is low so they will not save enough to see them through an extended period of unemployment.

Peran Pemerintah Dalam Siklus Bisnis dan Respon Swasta

- *Correlated risk.* In a recession, job loss will be widespread. This means that there will be a surge in insurance claims across the economy and a private provider would be unable to pay out on the scale required.
- *The insurance company cannot observe the reason for the job loss.* Therefore it cannot deny a claim from a person who lost a job because the employer was dissatisfied with the quality of his work or his level of effort. This creates a *moral hazard*, because a well-insured person would be expected to make less of an effort on the job. The insurance company would therefore have to charge a high premium to cover its costs. But charging the high premium will lead to *adverse selection*. The good prospects (those who enjoy working hard, for example) will shun the insurance and the company will be left with those likely to take the extra risks of losing their job. As a result, private providers will not serve this market.
- *The insurance company may not know when your firm is likely to close.* This, as above, is an example of the effect of *asymmetric information*. Suppose you learn that your firm is in difficulty. You will therefore buy insurance when you learn of the likely closure and it will be provided at reasonable rates because the insurance company does not know that you are likely to make a claim on them. Workers who know their firm is performing well will not buy insurance. The result, as above, is that the insurance company gets the bad prospects, in the sense that it will be people who know they are going to claim insurance who will want to be insured. Also, as above, the private market fails because the insurance company and the individual have different information.

Stimulus Fiskal (2)

Automatic Fiscal Policy & Cyclical and Structural Budget Balances



Di AS, dua *items* dalam anggaran Pemerintah dapat berubah secara otomatis sebagai respon terhadap kondisi perekonomian:

- Penerimaan pajak
- *Needs-tested spending*

Perubahan Otomatis dalam penerimaan pajak

- *Congress* menetapkan tingkat pajak yang harus dibayar oleh warga negara.
- Pajak yang dibayarkan bergantung pada *tax rates* and tingkat penghasilan.
- Di sisi lain, besarnya penghasilan berkaitan dengan dengan besaran PDB, karena itu penerimaan pajak bergantung pada besarnya PDB.
- Saat PDB riil meningkat sewaktu terjadi ekspansi perekonomian, maka penerimaan pajak akan meningkat.
- Saat PDB riil menurun karena terjadi resesi, maka penerimaan pajak menurun.

Stimulus Fiskal (3)

Needs-Tested Spending

- Pemerintah menciptakan program & kebijakan yang memberikan manfaat untuk individu dan bisnis.
- Pemberian manfaat ini tergantung pada kondisi perekonomian.
- Saat kondisi perekonomian dalam situasi ekspansif, pengangguran menurun, sehingga **needs-tested spending** menurun.
- Saat kondisi perekonomian dalam situasi resesi, pengangguran meningkat, sehingga **needs-tested spending** meningkat.



Stimulus Fiskal (4)

Automatic Stimulus

- Dalam masa resesi, penerimaan pajak menurun sementara belanja meningkat.
- Anggaran Pemerintah menyediakan *automatic stimulus* yang membantu memperkecil *recessionary gap*.
- Dalam masa perekonomian ekspansif, penerimaan pajak meningkat dan belanja menurun.
- Anggaran Pemerintah menyediakan *automatic restraint* yang membantu memperkecil *inflationary gap*.



Stimulus Fiskal (5)

Cyclical and Structural Balances

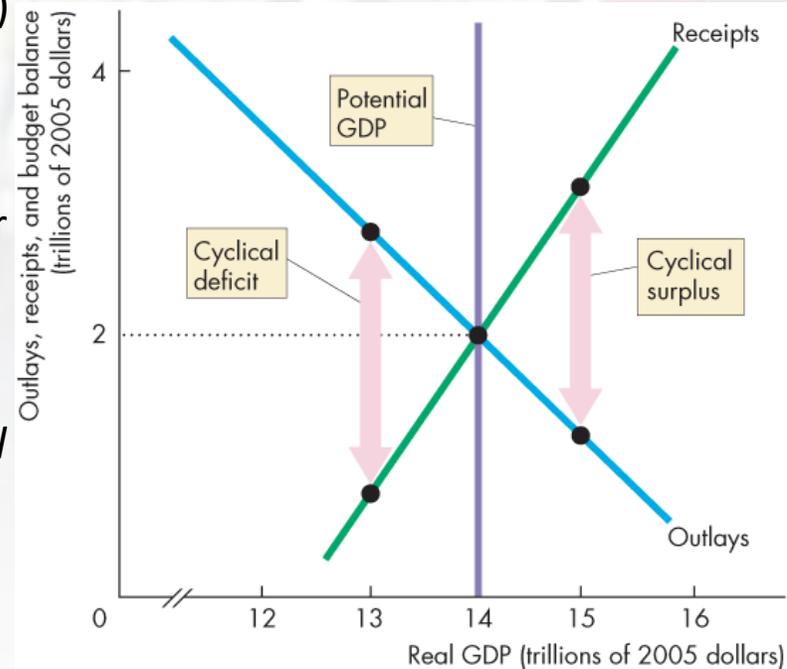
- **Structural surplus** atau **deficit** adalah keseimbangan anggaran yang terjadi jika perekonomian berada dalam kondisi *full employment* dan PDB *real* sebesar PDB *potential*.
- **Cyclical surplus** atau **deficit** adalah kondisi surplus atau defisit aktual dikurangi besaran *structural surplus* atau *deficit*.
- Karena itu, *cyclical surplus* atau **deficit** adalah surplus atau *deficit* yang terjadi karena PDB *real* tidak sama dengan PDB *potential*.



Stimulus Fiskal (6)

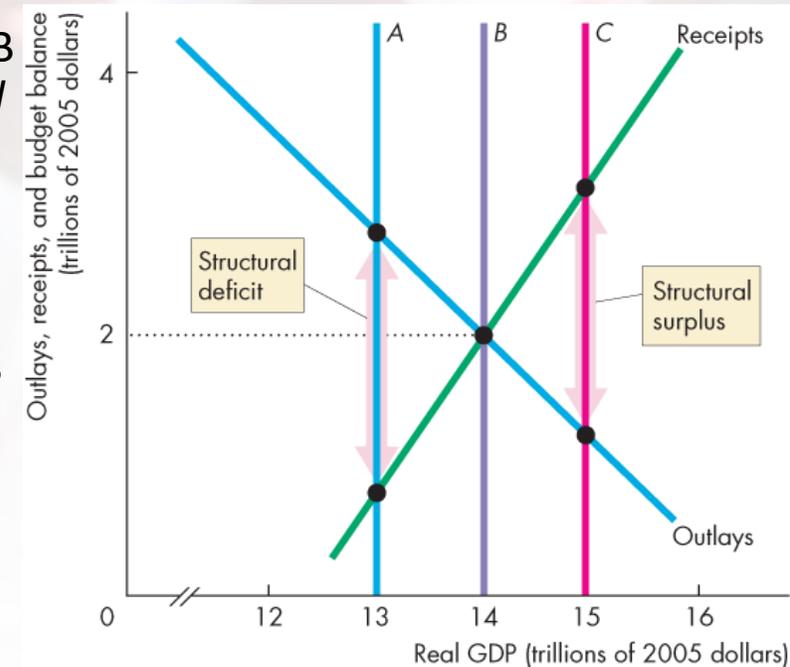
Cyclical dan Structural Balance

- Gambar disamping (a) mengilustrasikan *cyclical deficit* dan *cyclical surplus*.
- PDB potential sebesar \$14 triliun.
- Jika PDB *real* sebesar \$13 triliun, anggaran berada dalam *cyclical deficit*.
- Jika PDB *real* sebesar \$15 triliun, anggaran berada dalam *cyclical surplus*.



(a) Cyclical deficit and cyclical surplus

- Dalam gambar disamping (b), jika PDB *real* dan PDB *potential* sebesar \$13 triliun, anggaran berada dalam *structural deficit*.
- Jika PDB *real* dan PDB *potential* sebesar \$14 triliun, anggaran berada dalam kondisi *balanced*.
- Jika PDB *real* dan PDB *potential* sebesar \$15 triliun, anggaran berada dalam *structural surplus*.



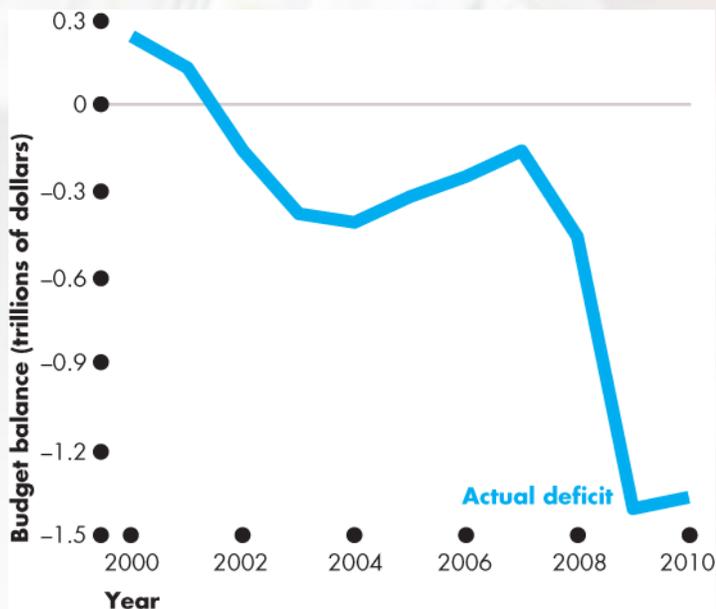
(b) Structural deficit and structural surplus

Stimulus Fiskal (7)

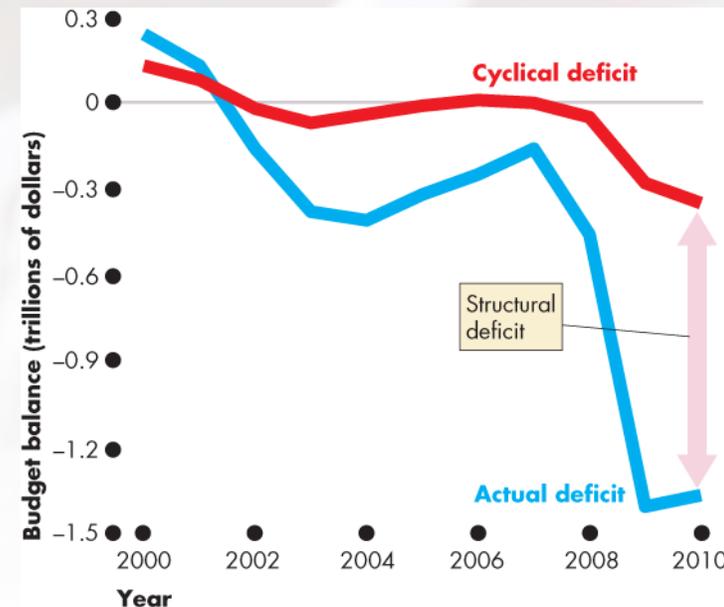
Cyclical dan Structural Balance

U.S. Structural Budget Balance in 2010

- Gambar disamping mengilustrasikan defisit anggaran AS secara aktual.
- Pada tahun 2010, defisit anggaran AS mencapai \$1,4 triliun
- Dengan adanya *recessionary gap* sebesar \$1 triliun seberapa besar *cyclical deficit*?
- Berapa besar *structural deficit*?



- Gambar disamping kanan menunjukkan *cyclical deficit*.
- Celah antara *cyclical deficit* dan *actual deficit* adalah *structural deficit*.
- *Cyclical deficit* pada tahun 2010 naik, tetapi jumlahnya kecil.
- Mayoritas defisit anggaran pada tahun 2010 merupakan *structural deficit*.



Stimulus Fiskal (8)

Discretionary Fiscal Stimulus

- Mayoritas discretionary fiscal stimulus berfokus pada efeknya terhadap aggregate demand.

Stimulus Fiskal & Aggregate Demand

- Perubahan dalam penerimaan dan belanja Pemerintah merubah *aggregate demand* dan memiliki *multiplier effects* dari sisi fiskal yaitu:
 - *Government Expenditure Multipliers*
 - *Tax Multiplier*



Stimulus Fiskal (9)

Government Expenditure Multipliers



- **Government expenditure multiplier** adalah pengaruh kuantitas dari perubahan belanja Pemerintah dalam PDB riil.
- Karena belanja Pemerintah adalah komponen dari *aggregate expenditure*, maka kenaikan dalam belanja Pemerintah akan meningkatkan PDB riil.
- Saat PDB riil naik, penghasilan akan meningkat dan konsumsi juga ikut naik, sebagai akibatnya *aggregate demand* akan naik.
- Jika ini hanya merupakan konsekuensi dari kenaikan belanja Pemerintah, maka *multiplier-nya* akan lebih besar dari 1.

Stimulus Fiskal (10)

Government Expenditure Multipliers



- Tetapi, pada umumnya kenaikan dalam belanja Pemerintah akan menaikkan utang Pemerintah dan meningkatkan suku bunga riil.
- Dengan biaya pinjaman (*cost of borrowing*) yang lebih tinggi, investasi akan berkurang, yang sedikit banyak menegasikan kenaikan belanja Pemerintah.
- Jika hal tersebut terjadi maka kenaikan belanja Pemerintah akan menyebabkan *multiplier* kurang dari 1.
- Pengaruh manakah yang lebih kuat?
- Konsensus menyatakan bahwa kemungkinan besar *crowding-out effect* mendominasi sehingga angka multiplier adalah kurang dari 1.

Stimulus Fiskal (11)

Tax Multipliers

- **Tax multiplier** adalah dampak dari perubahan pajak terhadap *aggregate demand*.
- *Demand-side effects* dari pemotongan pajak kemungkinan besar lebih kecil daripada kenaikan belanja Pemerintah dengan nilai yang sama.

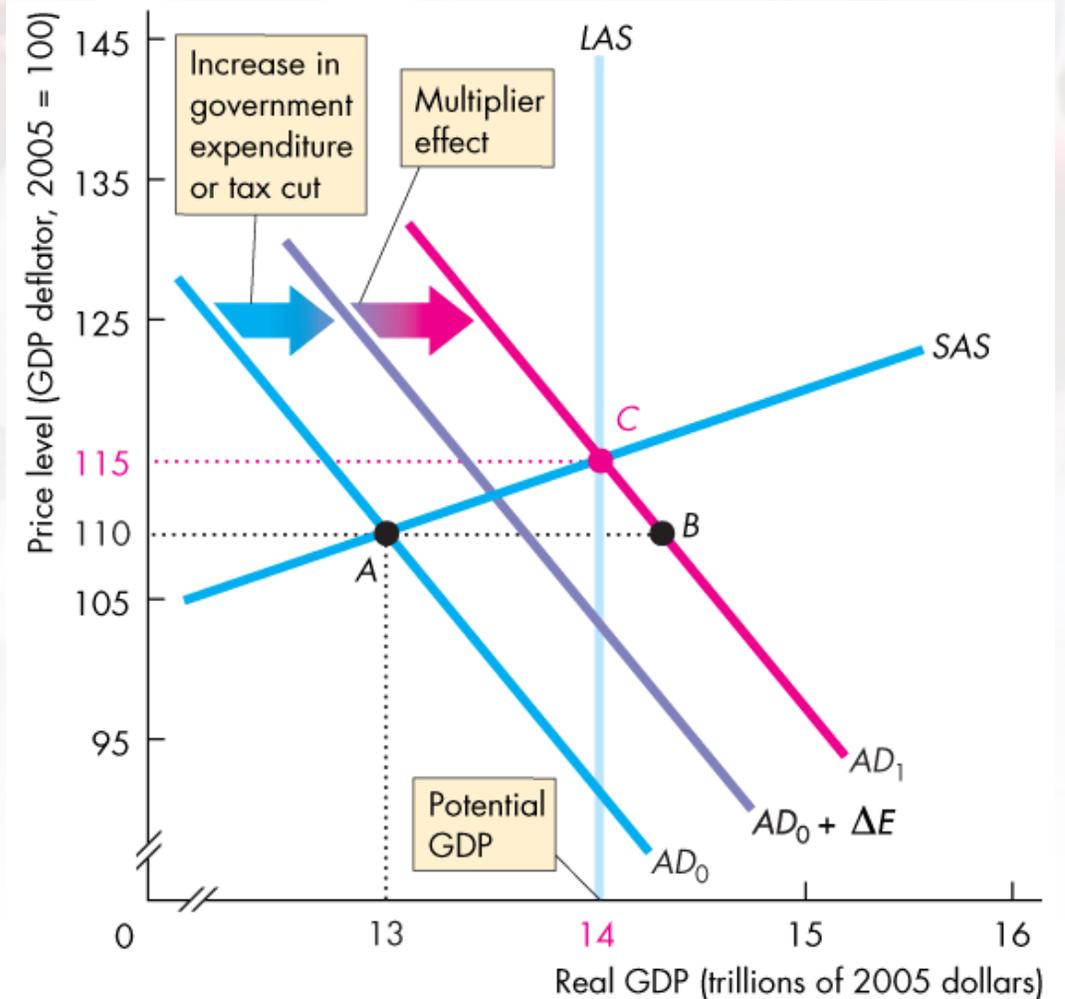


Stimulus Fiskal (12)

Mekanisme stimulus Fiskal



- Grafik di samping menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal berupa stimulus fiskal berfungsi menutup *recessionary gap*.
- Kenaikan dalam belanja Pemerintah atau potongan pajak akan meningkatkan *aggregate expenditure*.
- *Multiplier* yang tercipta akan meningkatkan *aggregate demand*.



Stimulus Fiskal (13)

Stimulus Fiskal dan *Aggregate Supply*



- Pajak mendorong terciptanya “wedge” diantara ***cost of labor*** dan ***take-home pay*** serta antara ***cost of borrowing*** dan ***the return on lending***.
- Pajak mengurangi tingkat *employment*, tingkat tabungan dan investasi serta menurunkan PDB riil dan tingkat pertumbuhannya.
- Kebijakan pemotongan pajak mengurangi dampak negatif hal diatas dan meningkatkan PDB riil dan tingkat pertumbuhannya.
- Efek pada sisi penawaran (*supply side*) pada kebijakan pemotongan pajak kemungkinan mendominasi efek *demand-side* dan membuat efek multiplier lebih besar daripada *government expenditure multiplier*.

Stimulus Fiskal (14)

Stimulus Fiskal dan *Time Lags*

Penggunaan *discretionary fiscal policy* pada umumnya terhambat oleh tiga jenis ***time lags***. sebagai berikut:



Recognition lag— waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan bahwa stimulus fiskal diperlukan.



Law-making lag—waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan Undang-Undang sehingga perubahan belanja atau tingkat pajak dapat diimplementasikan.



Impact lag—waktu yang dibutuhkan agar kebijakan stimulus fiskal melalui perubahan belanja atau pajak dapat mulai berdampak pada PDB riil dapat dirasakan.

Kebijakan Fiskal dan Pasar Global

▪ Pasar Global Sangat Penting

- Fluktuasi dalam pasar dunia menjelaskan mengapa ekonomi berfluktuasi ke atas dan ke bawah → **Net Export to GDP** ($X-M$) atau ($X+M$).

▪ Impor menahan fluktuasi di tingkat domestik

- *Aggregate demand multiplier* berkurang jika *marginal propensity to import* naik.
- Hal tersebut mampu menahan fluktuasi di tingkat domestik.

▪ Perdagangan membatasi penggunaan kebijakan fiskal

- Khususnya pada saat angka pengganda impor (*import multiplier*) relatif tinggi.





Kebijakan Fiskal di Indonesia

**Kebijakan Fiskal dalam
pengelolaan APBN**

Tujuan Kemerdekaan



Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan **pintu gerbang** kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, **adil dan makmur**.

Kita saat ini memegang estafet kemerdekaan

dan bertanggung jawab untuk membawa Indonesia mendekati tujuan kemerdekaan



Salah Satu Amanat pendiri bangsa adalah “menciptakan masyarakat adil makmur” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam konteks saat ini “mencerdaskan kehidupan bangsa” berarti membentuk bangsa yang **kreatif dan inovatif sehingga dapat bersaing di tingkat global**

Tujuan Pembangunan



- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi
- Mewujudkan keadilan sosial
- Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia

VISI INDONESIA 2045:

MENJADI NEGARA MAJU

PRASYARAT

PENDUDUK

319 Juta Jiwa

EKONOMI

ke **5** Terbesar di Dunia

PRODUKTIVITAS

Usia Produktif **47%**

MIDDLE INCOME

70% Kelas Menengah

URBAN

73% Tinggal di Kota

PERKAPITA
Pendapatan per Kapita

US\$ **23.199**

STRUKTUR

bergeser pada
**SEKTOR BERNILAI
TAMBAH TINGGI**

BISNIS

73%
Kue Ekonomi berasal dari Sektor Jasa

Infrastruktur

Infrastruktur yang layak menjadi penyokong mobilitas dan mendorong pembangunan



1

Kualitas SDM

Penguatan SDM melalui pendidikan dan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial



2

Teknologi

Pengayaan inovasi dan teknologi berperan dalam menjawab tantangan industri ke depan



3

Birokrasi Pemerintah

Perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis diperlukan



4

Tata Ruang Wilayah

Pengelolaan tata ruang yang baik dan didukung oleh sistem yang integratif



5

Sumber Daya Ekonomi dan Keuangan

APBN sehat menjadi kunci kesuksesan target 2045



6

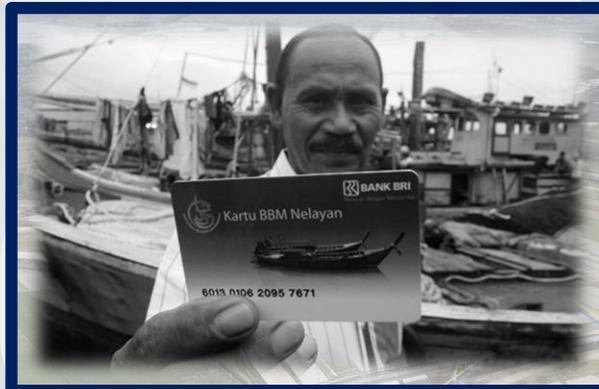
EMPAT PILAR UTAMA KEBIJAKAN EKONOMI

Penopang Utama Pertumbuhan Berkelanjutan Dan Stabilitas Ekonomi



1

**KEBIJAKAN
MONETER**



2

**KEBIJAKAN
FISKAL**



3

**EKONOMI
RIIL**



4

**SEKTOR
KEUANGAN**

TIGA PILAR UTAMA KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan Fiskal Merupakan Faktor Penting Dalam Mewujudkan APBN Yang Kredibel

Negara Maju, Masyarakat Adil Sejahtera

Pert. Ekonomi Berkualitas & Berkelanjutan

APBN Kredibel, Efisien, Efektif & Berkesinambungan

Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi

Optimalisasi
Penerimaan
Negara

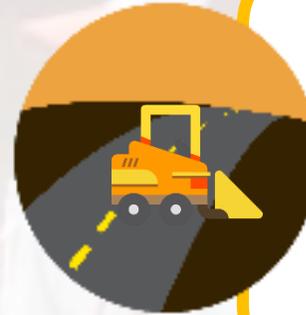
Pembiayaan
Yang
Bijak

Belanja
Negara
Berkualitas

MENGAPA KEBIJAKAN FISKAL YANG BAIK SANGAT PENTING ?



“Kebijakan fiskal yang baik tidak hanya akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, tetapi juga akan mendorong terciptanya pertumbuhan yang berkualitas dan “berkelanjutan”



“Kebijakan fiskal yang baik akan menghasilkan penerimaan negara yang optimal dan belanja negara yang efisien sehingga seluruh program pembangunan baik fisik atau non fisik dapat terlaksana”



“Kebijakan fiskal yang baik akan menciptakan iklim berusaha yang baik, menciptakan banyak lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan



“Kebijakan Fiskal yang baik dapat membuat suatu negara lebih tahan (resilience) dan tetap tumbuh dengan cukup baik saat perekonomian global dalam situasi yang tidak menentu atau krisis”

RAMBU-RAMBU PENGELOLAAN APBN

Fluktuasi Harga minyak

Lifting Minyak Stagnan



Anggaran Pendidikan
20%

UUD 1945



Anggaran Kesehatan
5%

UU 36/2009



Anggaran DAU

26%

Net penerimaan dalam negeri
UU 33/2004



Dana Desa

10%

Dari Transfer daerah secara bertahap
UU 6/2014

RUANG FISKAL TERBATAS

3%

Defisit thd PDB/tahun

UU 17/2003

60%

Maksimal Total Utang thd PDB

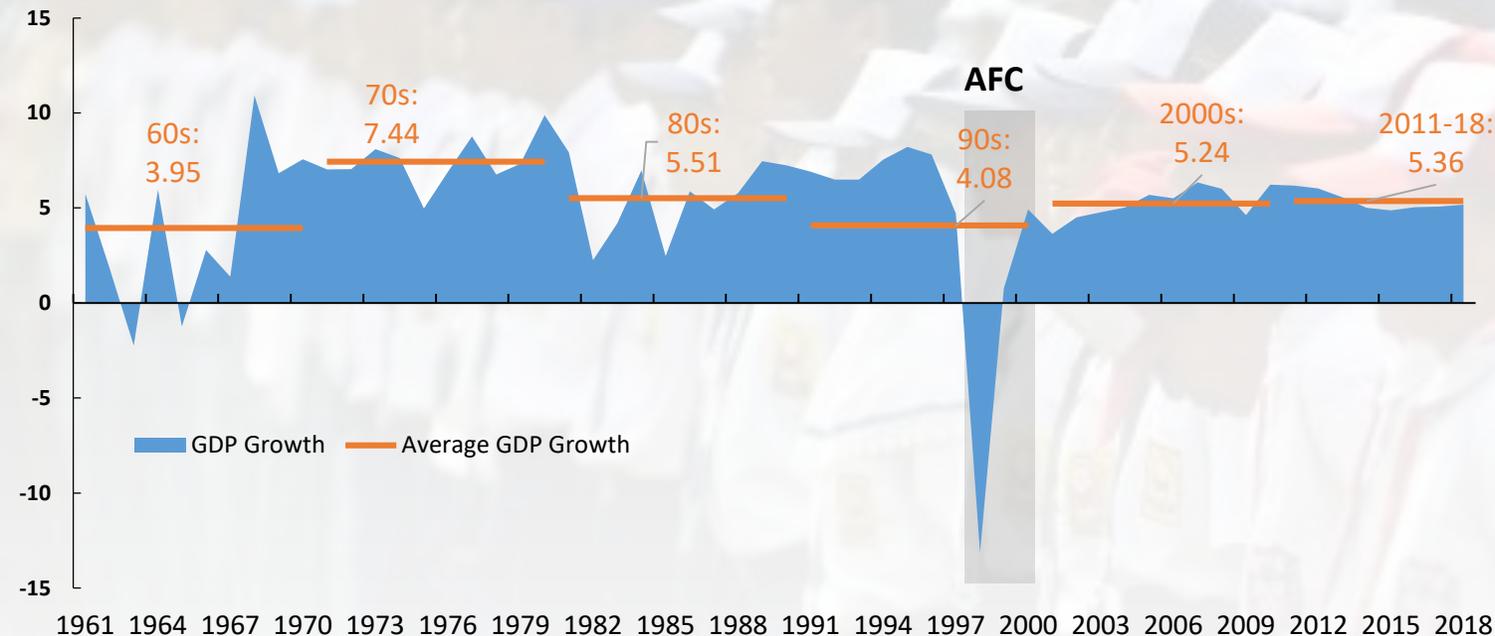
UU 17/2003

Efektivitas Perencanaan

Efisiensi Belanja Operasional

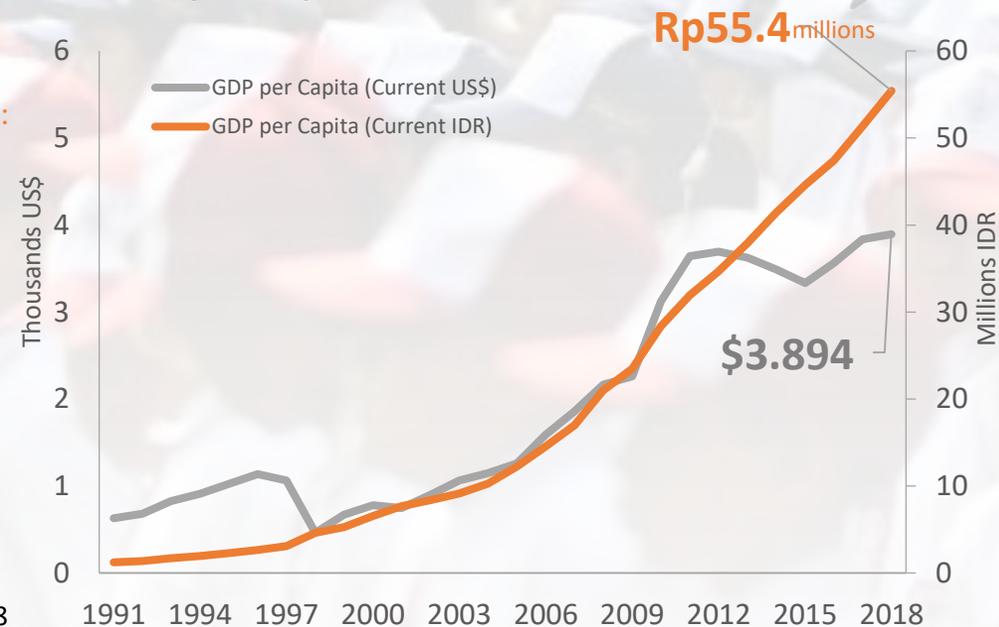
PENDAPATAN DOMESTIK BRUTO

Pertumbuhan PDB 1961 – 2018 (%)



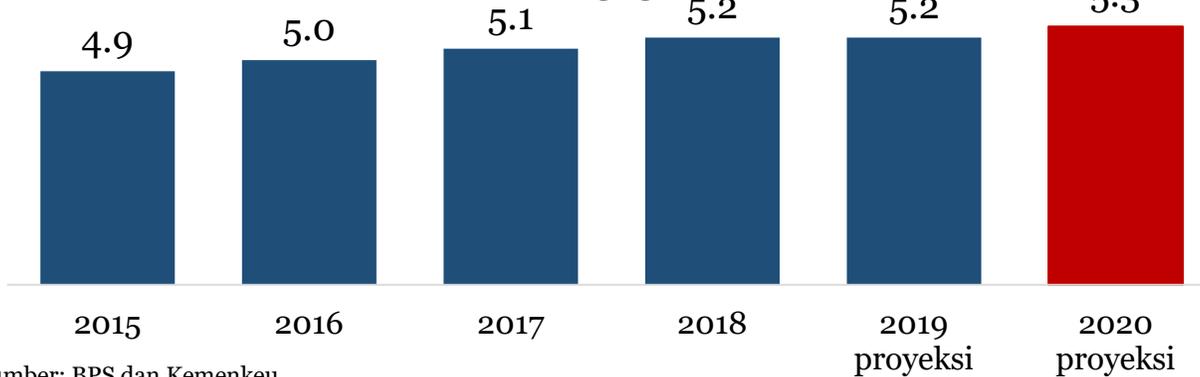
Source: Statistics Indonesia

PDB per Capita



Source: World Development Indicators

PERTUMBUHAN EKONOMI 2015-2020
(%, yoy)



Sumber: BPS dan Kemenkeu

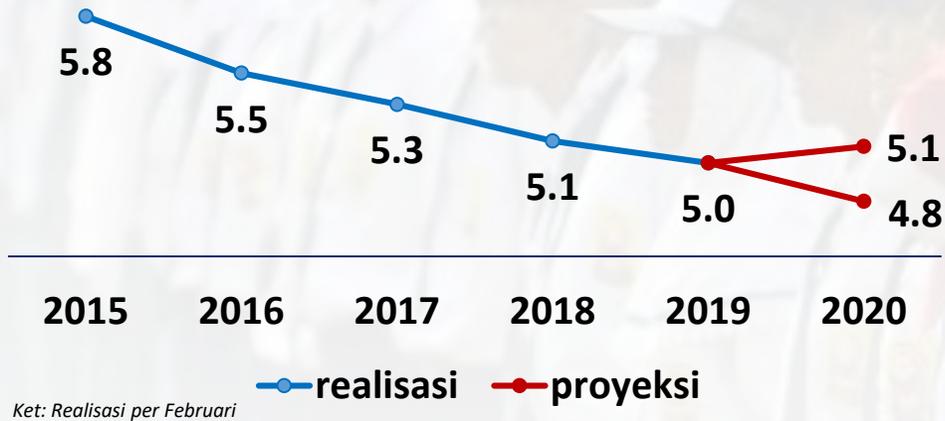
	2019	2020
IMF (Jul 19)	5,2	5,2
World Bank (Jun 18)	5,1	5,2
ADB (Apr 19)	5,2	5,3
Consensus Forecast (Mei 19)	5,1	5,1



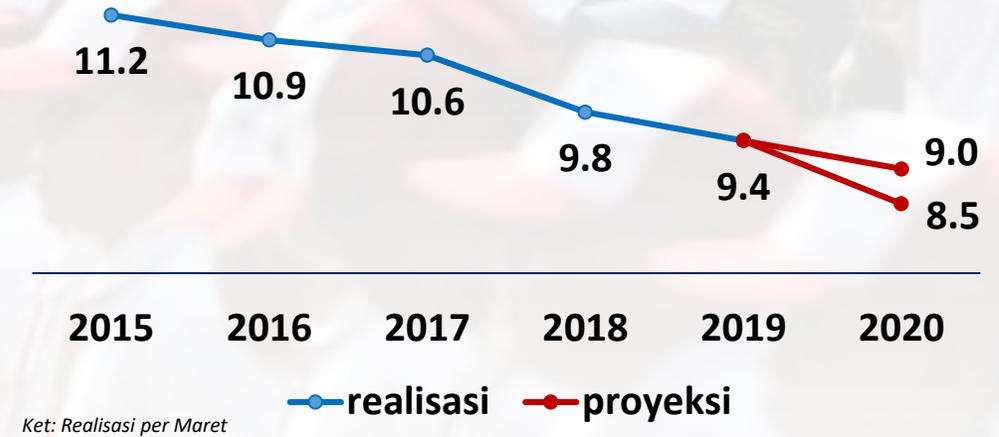
KESEJAHTERAAN



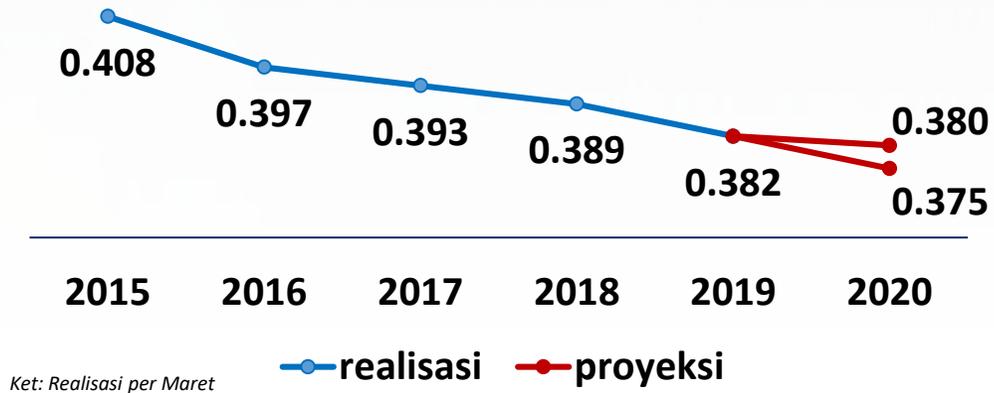
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



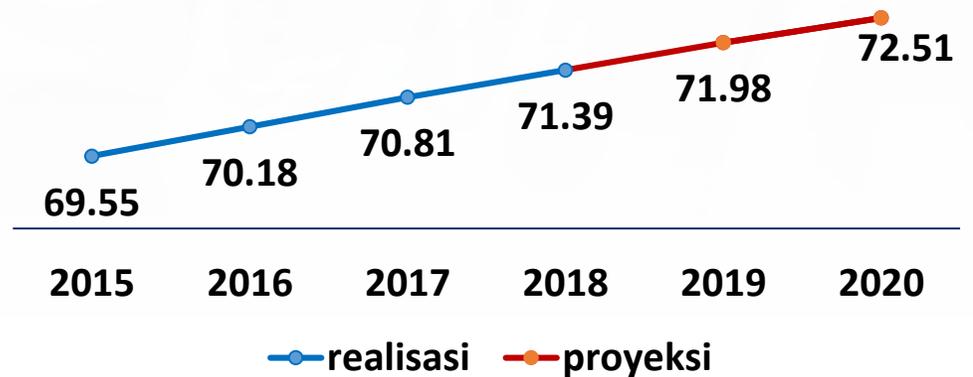
Tingkat Kemiskinan (%)



Rasio Gini



Indeks Pembangunan Manusia





Kebijakan Fiskal di Indonesia

**Kondisi Perekonomian Global dan
Tantangan yang dihadapi Indonesia**



WORLD ECONOMIC OUTLOOK UPDATE • JANUARY 21, 2019

GROWTH PROJECTIONS
A Weakening Global Expansion

4.6 4.9

THE WORLD IN 2019



- Fenomena umum:**
- Pelemahan pertumbuhan ekonomi
 - Pelemahan aktivitas manufaktur
 - *Rising nationalism* (perang dagang)
 - Kembalinya *low interest rate regime*
 - Meningkatnya tensi geopolitik



Sepanjang 2019, gejolak ekonomi & geopolitik global terus membayangi

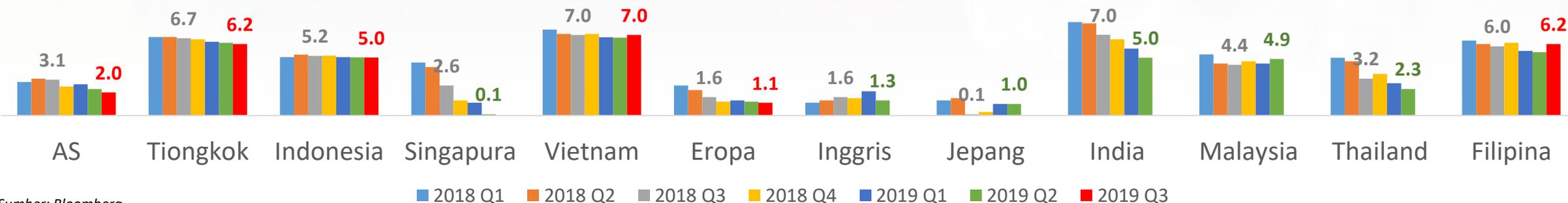
- **Perang dagang** sempat tereskalasi, tetapi sedikit mereda di akhir triwulan III.
- **The Fed** telah tiga kali menurunkan suku bunga dan mengintervensi pasar repo.
- Terjadi *inverted yield curve*.

• **Argentina** mengalami gagal bayar utang dan meminta restrukturisasi utang. Hasil Pemilu negara tersebut juga tidak direspon positif pelaku pasar.

- **Stimulus ECB**
- **No deal Brexit**

• Konflik geopolitik masih terjadi. **Perusahaan minyak Arab Saudi (Aramco)** diserang 10 drone (14/08) dan menurunkan 50% produksi minyak mentahnya.

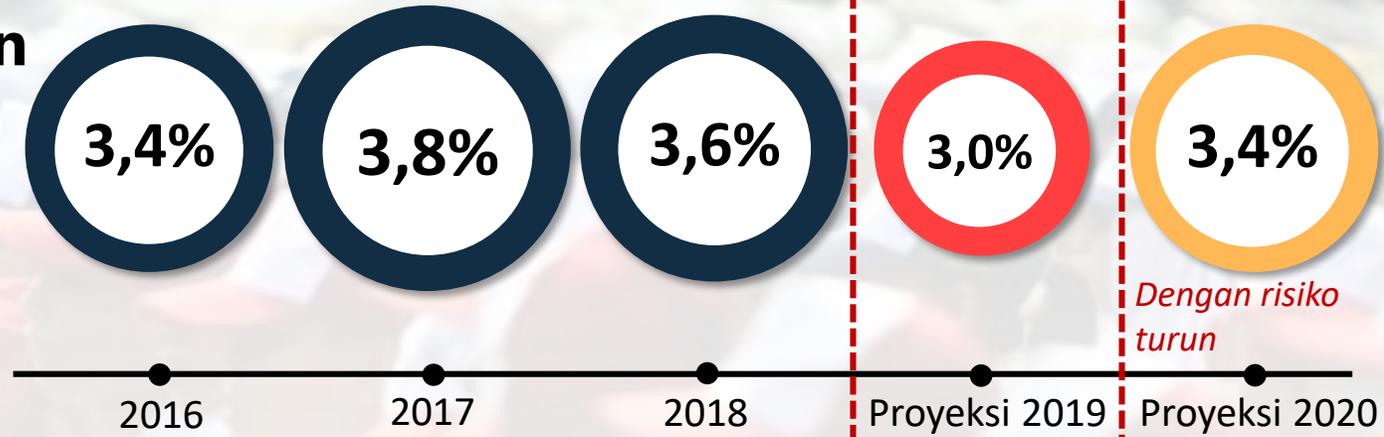
- **Ekonomi Tiongkok** terus menunjukkan pelemahan.
- Pemerintah membiarkan **Yuan terdepresiasi** hingga RMB7 per dolar.
- **Krisis politik Hong Kong** akibat demonstrasi.
- Jepang dan Korea Selatan terlibat perang dagang.



Ekonomi global tumbuh terendah sejak krisis keuangan global 2008

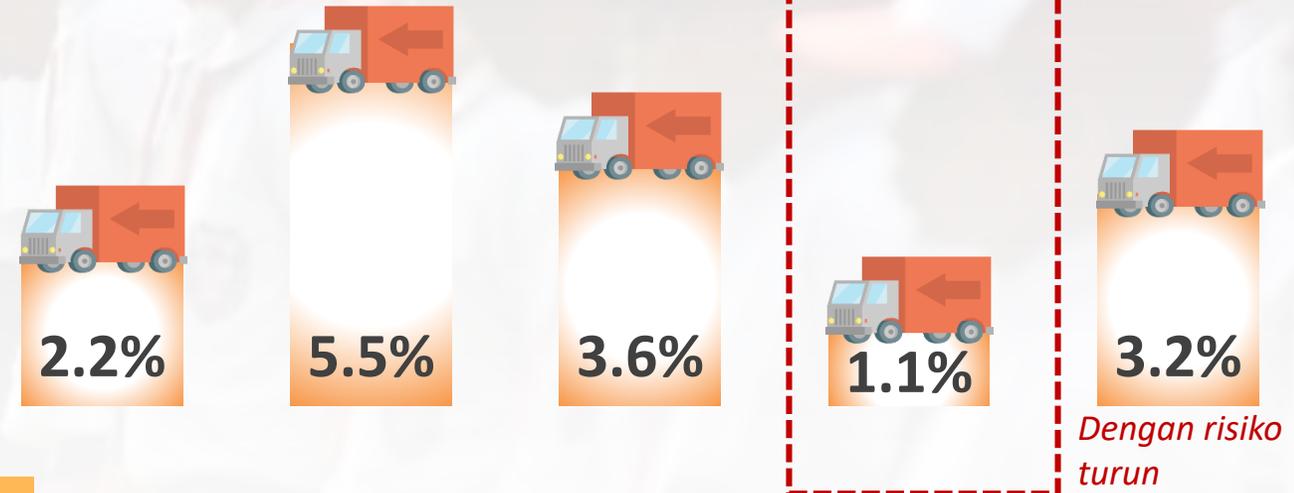
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi global terus direvisi ke bawah. Dalam 1 tahun terakhir, proyeksi pertumbuhan global 2019 turun 0,7 *percentage point*.
- **Perlambatan** terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk mitra dagang utama Indonesia.
- Perlambatan **direspon** dengan penurunan suku bunga dan kebijakan fiskal ekspansif.

Pertumbuhan ekonomi global



Pertumbuhan volume perdagangan global

Sumber: WEO October, IMF



RISIKO GLOBAL

yang harus diwaspadai:

1

Perang Dagang

2

Penurunan Manufaktur & Investasi

3

Resesi Ekonomi

4

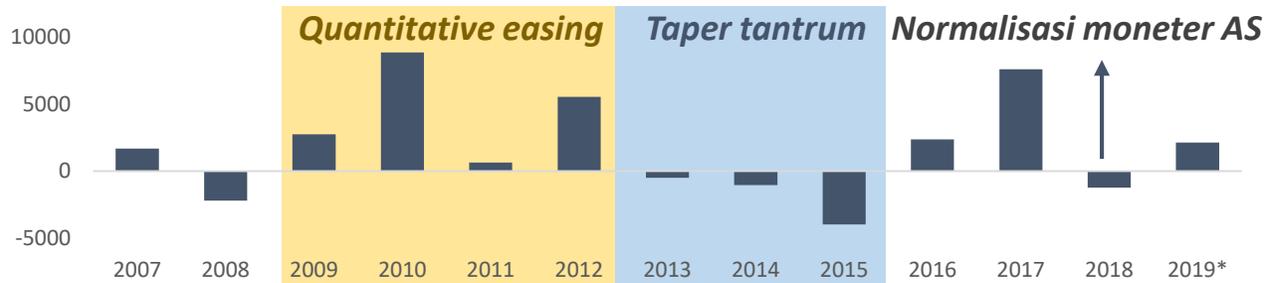
Tensi Geopolitik



TRANSMISI RISIKO KE DOMESTIK

Perlambatan ekonomi global berdampak ke perekonomian Indonesia lewat **3 jalur**:

Aliran Modal Masuk ke Indonesia (net)



Sumber: Haver, *) September

Pasar Finansial

Aliran modal ke Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju.

Perkembangan FDI (USD miliar)



Sumber: Bank Indonesia

Penanaman Modal Asing (FDI)

Sentimen negatif global dapat mempengaruhi *investor confidence*

Neraca Perdagangan (USD miliar)



Sumber: BPS

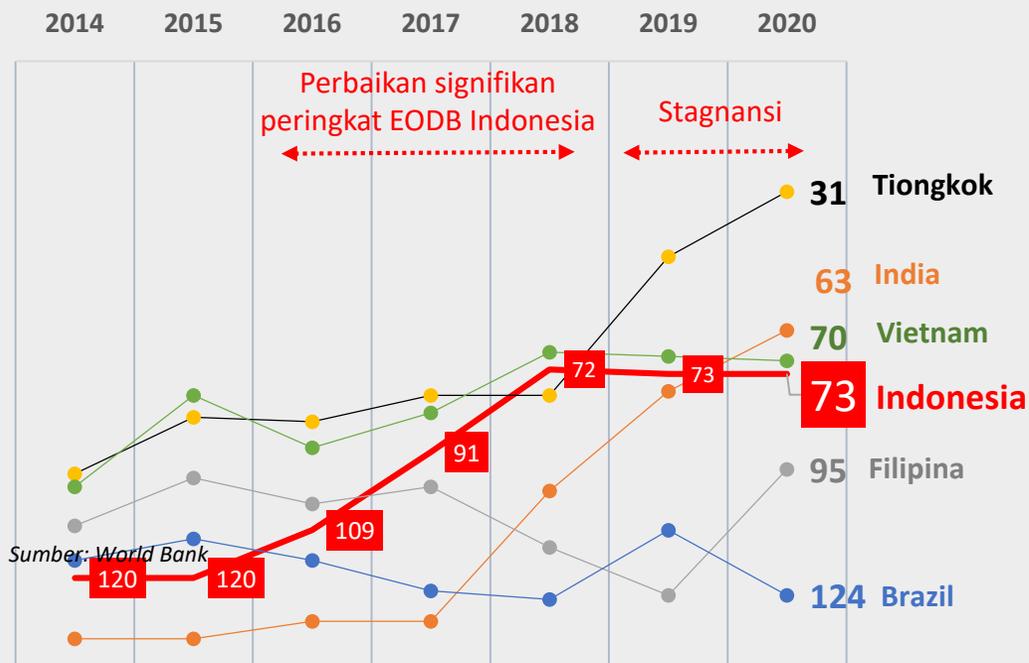
Perdagangan

Kinerja neraca non migas tertekan, defisit neraca migas masih tinggi.

Tantangan struktural Indonesia: Kemudahan Berusaha & Daya Saing

Kemudahan Berusaha

Peringkat Ease of Doing Business 2020



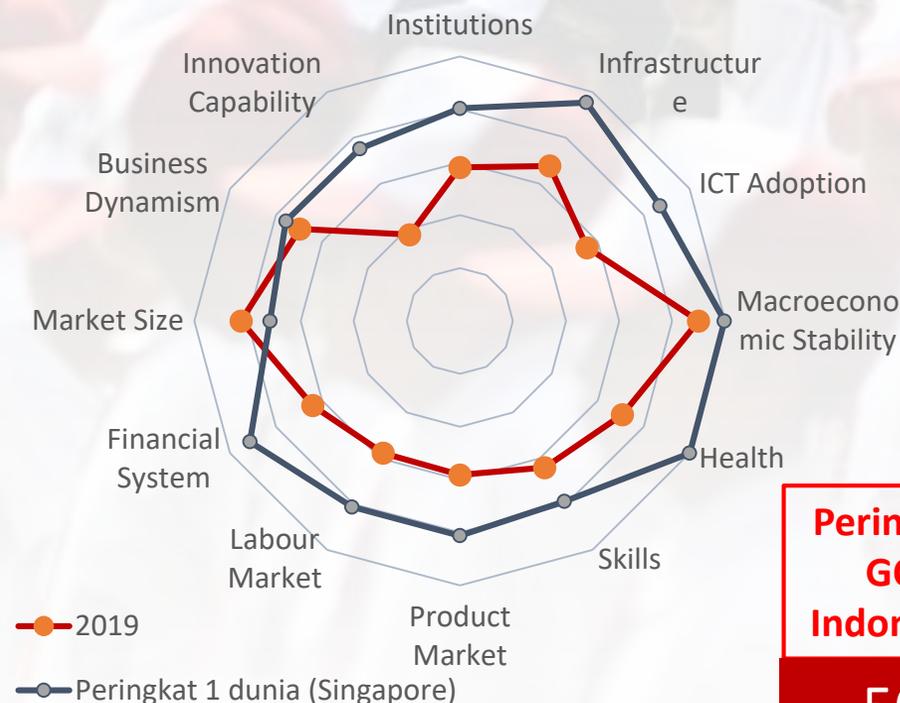
Sumber: World Bank

Skor EODB Indonesia

Tahun	Skor
2020	69,6
2019	68,2
2018	66,9
2017	64,7
2016	62,1
2015	59,2

Daya Saing

Skor Global Competitiveness Index 2019



Peringkat
GCI
Indonesia

50

- Di periode 2016 – 2018 (penilaian kinerja 2015 – 2017) **peringkat EODB meningkat signifikan**, didukung implementasi berbagai **reformasi struktural seperti subsidi BBM, perbaikan iklim investasi dan akselerasi infrastruktur**.
- **Dalam 2 tahun terakhir peringkat EODB relatif stagnan**, meski skor terus membaik, mengindikasikan **perlu implementasi reformasi yang lebih kuat**.
- **Reformasi ke depan harus menyorot pada penguatan sumber daya manusia** yang selama ini masih menjadi tantangan daya saing Indonesia.

- Hambatan daya saing Indonesia antara lain:
 - ✓ sumber daya manusia (kesehatan, skills, pasar tenaga kerja, inovasi)
 - ✓ Institusi
 - ✓ Infrastruktur
 - ✓ Sistem keuangan
- Area reformasi struktural harus fokus pada hal-hal di atas.



TANTANGAN STRUKTURAL & PEMBANGUNAN LAINNYA

Perlu langkah antisipatif dan responsif untuk akselerasi daya saing, melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM



OUTPUT GAP MENYEMPIT

Peningkatan *potential growth*
(perbaikan *supply side*)



KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Peningkatan daya saing dan
stabilitas ekonomi makro



DEMOGRAFI

Peningkatan produktivitas tenaga kerja
dan efektivitas perlindungan sosial



MIDDLE INCOME TRAP

Peningkatan produktivitas
dan daya saing



TRANSFORMASI EKONOMI & INDUSTRI 4,0

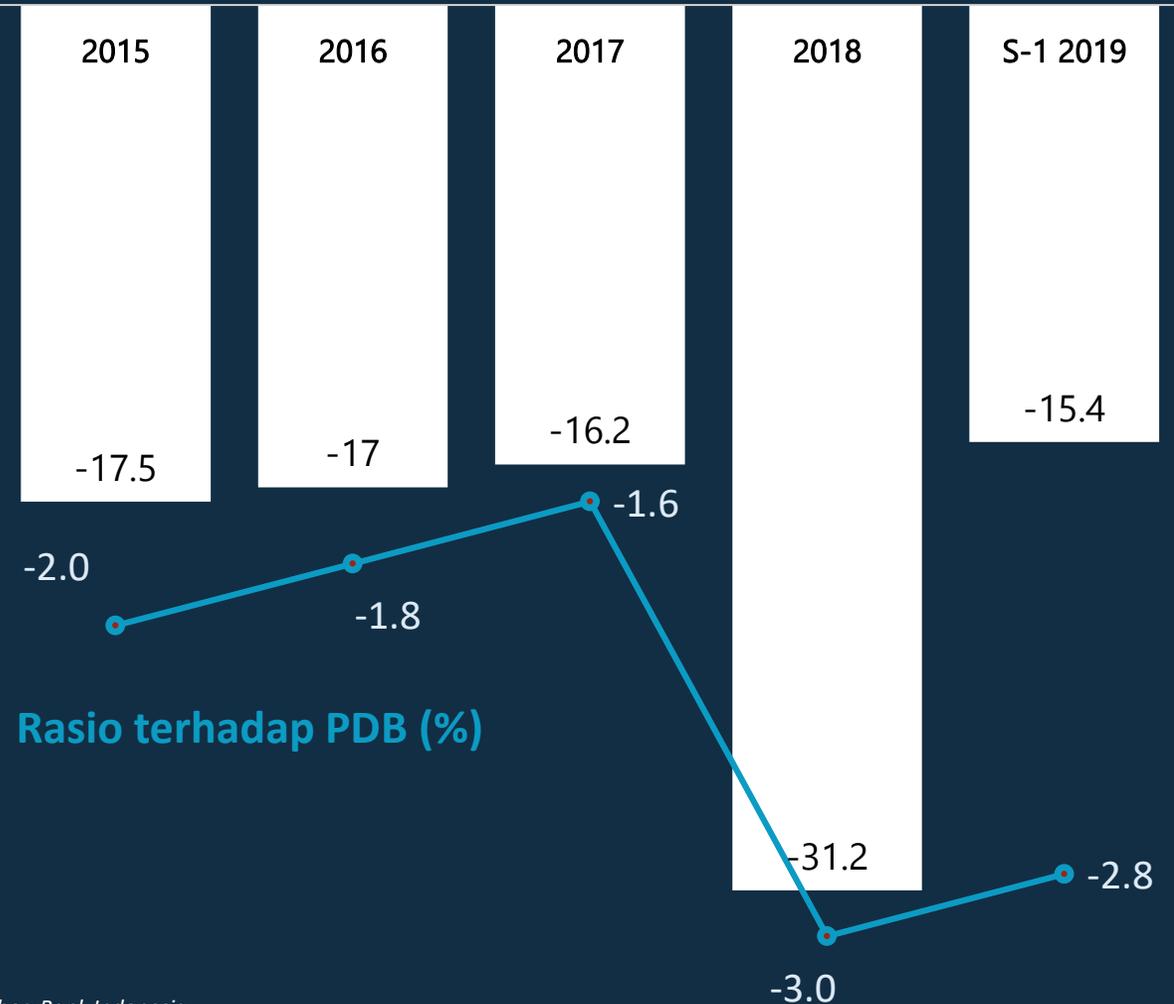
Peningkatan nilai tambah dan inovasi serta
penguasaan ICT



Defisit Neraca Berjalan

ga menjadi tantangan

Transaksi Berjalan (USD miliar)



- Defisit transaksi berjalan masih lebar antara lain disebabkan penurunan surplus neraca perdagangan serta meningkatnya defisit neraca jasa dan pendapatan primer.
- Peningkatan daya saing menjadi kunci utama untuk perbaikan kinerja transaksi berjalan.
- Neraca transaksi modal dan finansial masih mampu mencatatkan surplus. Namun, di tengah gejolak ekonomi global yang tinggi, Indonesia harus waspada terhadap risiko pengetatan likuiditas.
- Indonesia harus terus memperkuat sumber pembiayaan yang lebih *sustainable* seperti FDI. Untuk itu, iklim investasi akan terus diperbaiki.



Kebijakan Fiskal di Indonesia

Realisasi APBN 2019

Dunia telah mengakui Potensi Indonesia

Indonesia could be the fourth largest economy in the world by 2050

- PwC, 2017

Indonesia as one of the world's economic centre of gravity

- OECD, 2018

Indonesia is well positioned to pursue its further transformation toward an even more prosperous and inclusive society by taking advantage of several beneficial trends, including its young and expanding labor force, the rapid growth of the digital economy, and the growing role of Asia in the global economy

- IMF, 2017

**STANDARD
& POOR'S
(BBB)**

"The credit profile of Indonesia (BBB) is supported by government's relatively low debt and its moderate fiscal. Indonesia economy is growing faster than global peers at a similar level of income."

**Fitch Ratings
(BBB)**

"The focus on macro stability is also evident in credible budget assumptions in the previous few years."

**MOODY'S
(Baa2)**

"The credit profile of Indonesia (Baa2 stable) is supported by low government debt ratios, the large size of its economy and healthy growth prospects"

**R&I
(BBB)**

"Indonesia's economy growing at solid pace. Its economic resilience to external shock is maintained"

**JCR Japan Credit Rating Agency, Ltd.
(BBB)**

"Solid economic growth, resilience to external shock, a large-scale infrastructure development, the progress of the administration's economic policy"



Pertumbuhan ekonomi

Sumber: BPS

(2018)

5,17%

(Q1-2019)

5,07%

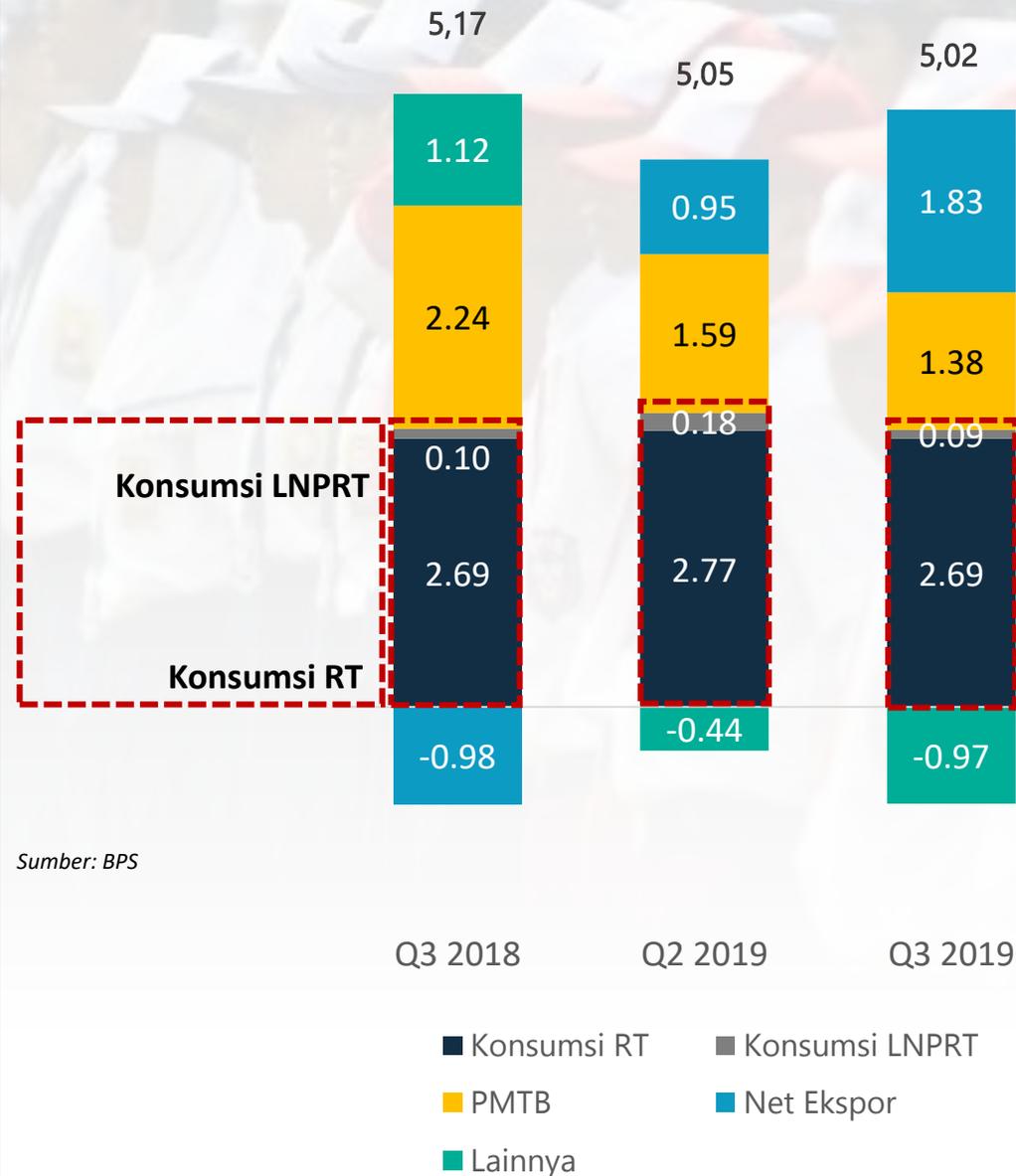
(Q2 2019)

5,05%

(Q3 2019)

5,02%

Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran



Di tengah perlambatan ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia masih sehat ditopang oleh permintaan domestik.

Ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,02 persen di Q3-2019 didorong oleh stabilnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan ekspor.



Perlu diwaspadai dampak penurunan impor terhadap investasi ke depan

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q3 masih stabil, didukung oleh stabilnya konsumsi domestik dan net ekspor yang positif seiring kenaikan ekspor dan penurunan impor yang cukup dalam.
- Ke depan, penurunan impor tersebut perlu diwaspadai dengan kaitannya terhadap aktivitas investasi.

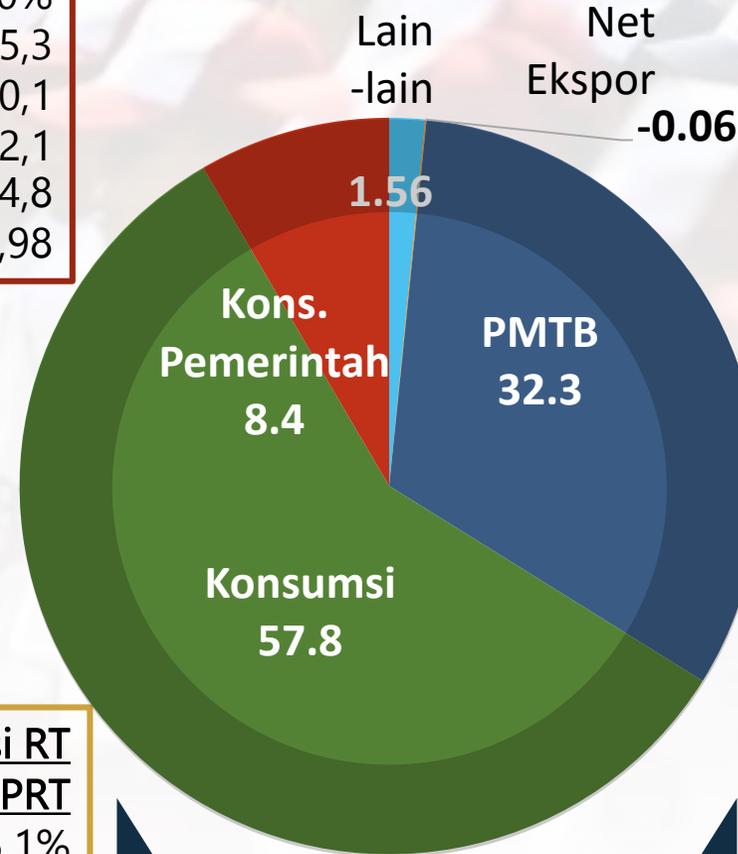
Arah kebijakan:

- Menjaga **konsumsi** dan daya beli RT, stabilitas pasokan dan harga.
- Mendorong **investasi** dengan insentif fiskal, peran kuasi-fiskal, dan partisipasi swasta.
- Mendorong **ekspor** sektor manufaktur dan menggalakkan pariwisata.

<u>Growth Konsumsi Pemerintah</u>
Rata2 2006-2015: 6,0%
2015: 5,3
2016: -0,1
2017: 2,1
2018: 4,8
2019 Q3: 0,98

Sumber: BPS

Distribusi PDB Q3-2019 (%)



Growth Ekspor

Rata2 2006-2015: 5,2%
2015: -2,1
2016: -1,7
2017: 8,9
2018: 6,5
2019 Q3: 0,02

Growth Impor

Rata2 2006-2015: 4,7%
2015: -6,2
2016: -2,4
2017: 8,1
2018: 12,0
2019 Q3: -8,61

Growth Konsumsi RT dan LNPRT

Rata2 2006-2015: 5,1%
2015: 4,8
2016: 5,0
2017: 5,0
2018: 5,1
2019 Q3: 5,06

Growth PMTB

Rata2 2006-2015: 6,8%
2015: 5,3
2016: -0,1
2017: 2,1
2018: 4,8
2019 Q3: 4,21

Konsumsi RT dan investasi sebagai engine of growth



AGGREGATE SUPPLY

Pertumbuhan PDB Sektoral (%, YoY)	2018					2019			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	S1	Q3
Sektor Primer	2.45	3.96	3.30	3.19	3.24	2.01	3.13	2.62	2.67
Pertanian	3.34	4.72	3.66	3.87	3.91	1.82	5.33	3.46	3.08
Pertambangan	1.06	2.65	2.67	2.25	2.16	2.32	-0.71	1.18	1.94
Sektor Sekunder	5.39	4.56	4.84	4.72	4.87	4.51	4.17	4.43	4.60
Manufaktur	4.60	3.88	4.35	4.25	4.27	3.86	3.54	3.85	4.15
Listrik, Gas, dan Air	3.33	7.29	5.62	5.64	5.47	4.48	2.65	3.64	3.81
Konstruksi	7.35	5.73	5.79	5.58	6.09	5.91	5.69	5.75	5.65
Tertiary Sector	5.80	5.70	6.03	5.80	5.83	6.56	6.47	6.44	6.29
Perdagangan	4.99	5.22	5.28	4.39	4.97	5.27	4.63	4.88	4.75
Transportasi dan Pergudangan	8.56	8.70	5.65	5.34	7.01	5.25	5.78	5.90	6.63
Informasi dan Komunikasi	7.76	5.11	8.14	7.17	7.04	9.06	9.60	9.27	9.15
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.23	3.06	3.14	6.27	4.17	7.32	4.55	6.01	6.15
Jasa Lainnya	5.56	6.17	6.79	6.45	6.25	6.95	7.60	7.04	6.57
PDB	5.06	5.27	5.17	5.18	5.17	5.07	5.05	5.04	5.02

Pertumbuhan ekonomi sektoral menunjukkan perlunya penguatan transformasi

- Sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan selalu tumbuh di bawah rata-rata nasional, padahal total kontribusi terhadap PDB sebesar 46%
- Pertumbuhan sektor pertambangan fluktuatif seiring pergerakan harga komoditas
- Sektor jasa selalu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional

APBN Indonesia di Tahun 2019

PENDAPATAN

2,165.1

(14.38 % PDB)*

PENDAPATAN PAJAK

1,786.4

(11.86 % PDB)*

PNBP

378.3

(2.51 % PDB)*

HIBAH

0.4

(0.002 % PDB)*

**APBN
2019**

(Triliun Rp)

** % of GDP Estimation*

DEFISIT

1.84%

KESEIMBANGAN PRIMER

(20.1).

(-0.13 % PDB)*

BELANJA

2,461.1

(16.34 PDB)*

BELANJA PEM. PUSAT

1,634.3

(10.85 % PDB)*

TKDD & DANA DESA

(5.49 % PDB)* **826.8**

PEMBIAYAAN UTANG

(2.38 % PDB)* **359.4**

PEMBIAYAAN INVESTASI

(-0.5 % PDB)* **(75.9)**

2019

REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN S.D. 31 OKTOBER TAHUN 2019

Mencapai 65,7% dari target APBN

Uraian (triliun Rupiah)	2017		2018				2019			
	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Okt	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN	Growth (%)
1. PPh MIGAS	42,4	101,5	38,1	54,3	142,4	28,1	66,2	49,3	74,5	(9,3)
2. PAJAK NON MIGAS	822,0	66,2	1.385,9	961,9	69,4	17,0	1.511,4	969,2	64,1	0,8
a. PPh Non Migas	460,5	62,0	817,0	538,8	66,0	17,0	828,3	556,6	67,2	3,3
b. Pajak pertambahan nilai	352,7	74,2	541,8	405,2	74,8	14,9	655,4	388,0	59,2	(4,2)
c. Pajak bumi dan bangunan	3,3	21,6	17,4	11,8	67,7	253,2	19,1	19,2	100,4	63,1
d. Pajak lainnya	5,5	63,8	9,7	6,1	63,0	10,0	8,6	5,4	62,9	(11,3)
3. KEPABEANAN DAN CUKAI	127,2	67,3	194,1	144,0	74,2	13,2	208,8	155,4	74,4	7,9
a. Cukai	96,2	62,8	155,4	106,2	68,3	10,3	165,5	122,4	74,0	15,3
b. Bea masuk	27,9	83,7	35,7	32,2	90,1	15,5	38,9	30,2	77,5	(6,3)
c. Bea keluar	3,1	115,3	3,0	5,7	189,7	82,7	4,4	2,9	64,8	(49,6)
JUMLAH	991,7	67,3	1.618,1	1.160,2	71,7	17,0	1.786,4	1.173,9	65,7	1,2

1. Secara nominal, realisasi penerimaan Perpajakan hingga bulan Oktober 2019 **lebih tinggi** dibandingkan periode yang sama tahun 2018.
2. Pemerintah memberikan **insentif perpajakan** dalam kerangka belanja perpajakan (*tax expenditure*) dengan memberikan fasilitas perpajakan guna mendorong ekonomi inklusif, meningkatkan daya saing, dan membangun iklim investasi

REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT S.D 31 OKTOBER 2019

Kinerja lebih baik pada periode ini terutama pada Belanja K/L.

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2017			2018			2019			
	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Okt	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN	Growth (%)
1. Belanja K/L	511,4	64,0	847,4	586,7	69,2	14,7	855,4	633,5	74,0	8,0
a. Belanja Pegawai	166,5	74,5	227,5	181,7	79,9	9,1	224,4	204,4	91,1	12,5
b. Belanja Barang	192,1	64,9	338,8	228,5	67,4	18,9	344,6	236,5	68,6	3,5
c. Belanja Modal	106,0	47,2	203,9	107,3	52,7	1,2	189,3	100,8	53,2	(6,1)
d. Bantuan Sosial	46,8	85,7	77,3	69,1	89,5	47,8	97,1	91,7	94,5	32,7
2. Belanja Non K/L	387,1	68,1	607,1	487,7	80,3	26,0	778,9	487,6	62,6	(0,0)
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	183,1	83,5	238,6	213,2	89,4	16,4	275,9	220,6	80,0	3,5
b. Subsidi	102,7	60,8	156,2	160,4	102,6	56,2	224,3	146,2	65,2	(8,8)
(1) Subsidi Energi	66,2	73,7	94,5	117,4	124,2	77,3	160,0	98,5	61,6	(16,0)
(2) Subsidi Non Energi	36,5	46,1	61,7	43,0	69,7	17,9	64,3	47,7	74,0	10,8
c. Belanja Hibah	2,7	49,2	1,5	0,1	6,4	(96,5)	1,9	2,3	117,6	-
d. Belanja Lain-Lain	4,1	8,3	67,2	6,8	10,2	64,6	114,0	2,3	2,0	(66,3)
JUMLAH	898,5	65,7	1.454,5	1.074,4	73,9	19,6	1.634,3	1.121,1	68,6	4,3

Realisasi subsidi energi s.d Okt 2019:

- Lebih rendah dari real s.d Okt 2018
- Dipengaruhi rendahnya ICP
- Terdapat pelunasan kurang bayar subsidi BBM dan LPG Rp10 T (pagu APBN 2019: Rp15,9 T)
- TA 2018: realisasi kurang bayar subsidi energi sebesar Rp17,6 T

Belanja lain-lain mayoritas direalokasi ke BA BUN lainnya atau BA K/L a.l. untuk cadangan kurang bayar subsidi, kurang bayar TKDD, penanggulangan bencana, dan keperluan mendesak

Realisasi subsidi non energi s.d Okt 2019:

- Terdapat pelunasan kurang bayar subsidi pupuk Rp9,8 T

REALISASI TKDD S.D. 31 OKTOBER TAHUN 2019

Mencapai 81,9% dari target APBN sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018, dipengaruhi oleh penyerapan DBH, DAK Fisik, dan Dana Otsus.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (triliun rupiah)	2017		2018				2019			
	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 31 Okt	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Oktober	% thd APBN	Growth (%)
A. Transfer ke Daerah	591,3	83,7	706,2	602,0	85,2	1,8	756,8	624,9	82,6	3,8
1. Dana Perimbangan	568,9	83,8	676,6	578,8	85,5	1,7	724,6	602,4	83,1	4,1
a. Dana Transfer Umum	436,1	88,3	490,7	436,8	89,0	0,2	524,2	452,8	86,4	3,7
1) Dana Bagi Hasil	70,9	74,4	89,2	69,1	77,5	(2,6)	106,4	70,3	66,1	1,7
2) Dana Alokasi Umum	365,1	91,6	401,5	367,6	91,6	0,7	417,9	382,5	91,5	4,1
b. Dana Transfer Khusus	132,9	72,0	185,9	142,0	76,4	6,9	200,4	149,6	74,7	5,3
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	44,0	63,3	62,4	45,2	72,4	2,7	69,3	45,3	65,4	0,3
2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	88,8	77,2	123,5	96,8	78,4	9,0	131,0	104,3	79,6	7,7
2. Dana Insentif Daerah	7,5	100,0	8,5	8,1	95,0	7,6	10,0	9,7	96,7	19,8
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	14,9	73,6	21,1	15,1	71,8	1,5	22,2	12,8	57,7	(15,4)
B. Dana Desa	47,5	79,2	60,0	44,4	74,0	-	70,0	52,0	74,2	17,0
JUMLAH	638,8	83,4	766,2	646,4	84,4	1,2	826,8	676,9	81,9	4,7

- Realisasi TKDD tumbuh 4,74% dibanding periode yang sama tahun 2018
- Pertumbuhan didorong terutama pada Dana Transfer Umum (DBH + DAU) yg secara nominal tumbuh 3,7%, sementara untuk Dana Transfer Khusus (DTK) secara nominal tumbuh (5,3%)
- Realisasi Dana Desa sd 31 Oktober 2019 secara nominal tumbuh 17,0%.

Penting menjaga stabilitas domestik dan memperkuat reformasi di tengah ketidakpastian global



Menjaga konsumsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia



Meningkatkan daya saing untuk meningkatkan investasi & ekspor



Melakukan reformasi struktural dan menjaga stabilitas ekonomi-politik



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor ekonomi

5 Program Kerja Prioritas Pemerintah di Tengah Ketidakpastian Global

Pembangunan SDM



Infrastruktur

Penyederhanaan Regulasi



Penyederhanaan Birokrasi

Transformasi Ekonomi





Kebijakan Fiskal di Indonesia

Fokus Kebijakan APBN 2020

Peran Kebijakan Fiskal Dan APBN

3 FUNGSI UTAMA KEBIJAKAN FISKAL & APBN

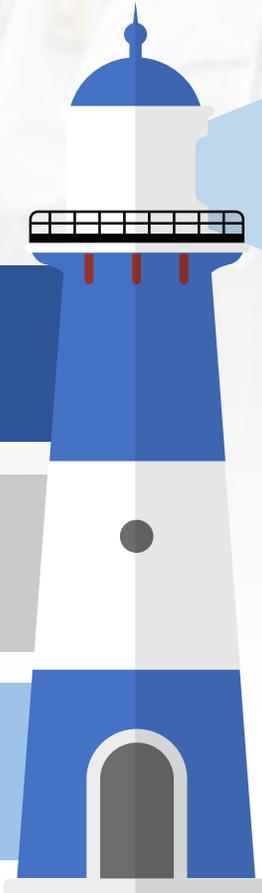
STABILITAS



DISTRIBUSI



ALOKASI



Stabilitas Makroekonomi



- Tingkat defisit dan utang yang terkendali
- Pembiayaan yang pruden
- Mitigasi risiko bencanadan pengembangan sumber daya terbarukan
- Penguatan *fiscal buffer*

Alokasi Sumber Daya

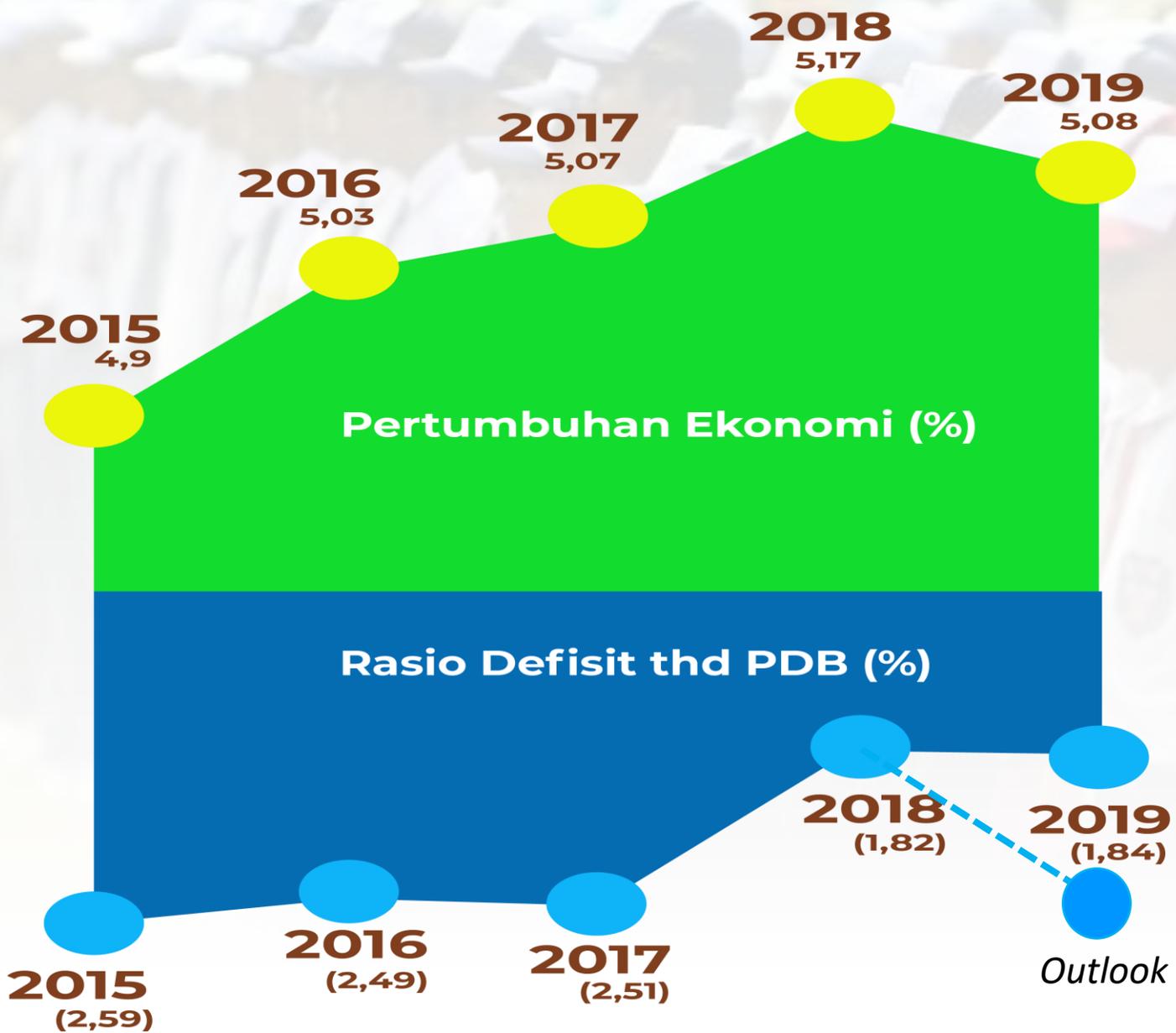


- Belanja yang berkualitas, produktif dan mendukung pembangunan
- Prioritas pada belanja infrastruktur dan SDM
- Penyediaan layanan publik yang memadai

Distribusi Pendapatan



- Optimalisasi penerimaan
- Kebijakan perpajakan yang adil
- Program-program bantuan sosial yang tepat sasaran
- Penguatan desentralisasi fiskal



APBN didorong untuk menjadi instrumen

Countercyclical

agar dapat merespon risiko pelemahan perekonomian.

Defisit APBN

diperkirakan mengalami pelebaran dari **1,84%** menjadi lebih dari **2,0%** thd PDB



Kebijakan APBN 2020

APBN tahun 2020 diarahkan untuk mendukung penguatan daya saing dan sumber daya manusia





Pembangunan Sumber Daya Manusia

- Pembangunan sumber daya manusia akan menjadi menjadi prioritas utama untuk merespons bonus demografi
- Menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
- Perlu adanya endowment fund yang besar untuk manajemen SDM
- Optimalisasi kerja sama dengan industri



Pembangunan Infrastruktur

- Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat
- Termasuk pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas.



5 PROGRAM KERJA PRIORITAS



Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi

- Presiden Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar, yaitu:
- UU Cipta Lapangan Kerja
- UU Pemberdayaan UMKM
- UU tersebut akan merevisi Undang-Undang yang dinilai menghambat tercapainya lapangan kerja dan UMKM



Transformasi Ekonomi

- Transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.



Penyederhanaan Birokrasi

- Pemotong birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi
- Membuat eselon menjadi dua level saja, yaitu tingkat fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian.

Indikator Ekonomi Makro dan Pembangunan Tahun 2020

memperhatikan perkembangan perekonomian dan prospek serta risiko ke depan

Indikator Ekonomi Makro

Terdapat perubahan pada harga dan *lifting* minyak dengan mempertimbangan harga minyak dunia dan prospek *lifting* minyak ke depan



Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,3



Inflasi (% yoy)

3,1



Nilai Tukar (Rp/USD)

14.400



Suku Bunga SPN (%)

5,4



Harga Minyak (US\$/barrel)

63



Lifting Minyak (ribu barrel/hari)

755



Lifting Gas (ribu barrel/hari)

1.191

Target Pembangunan

Upaya meningkatkan kesejahteraan a.l ditunjukkan dengan kesepakatan untuk menurunkan target tingkat pengangguran di dalam APBN 2020



Pengangguran (%)

4,8 – 5,0



Kemiskinan (%)

8,5 – 9,0



Gini Rasio (indeks)

0,375 – 0,380



Indeks Pembangunan Manusia

72,51

Postur APBN 2020

diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian

Penerimaan
Perpajakan
1.865,7
(2015: 1.240,4)

PNBP
367,0
(2015: 255,6)

Hibah
0,5
(2015: 12,0)

Pendapatan
Negara
2.233,2
(2015: 1.508,0)



Belanja
Negara
2.540,4
(2015: 1.806,5)



Belanja Pemerintah
Pusat
1.683,5
(2015: 1.183,3)

TKDD
856,9
(2015: 623,1)

Defisit/Pembiayaan
307,2
(2015: 298,5)

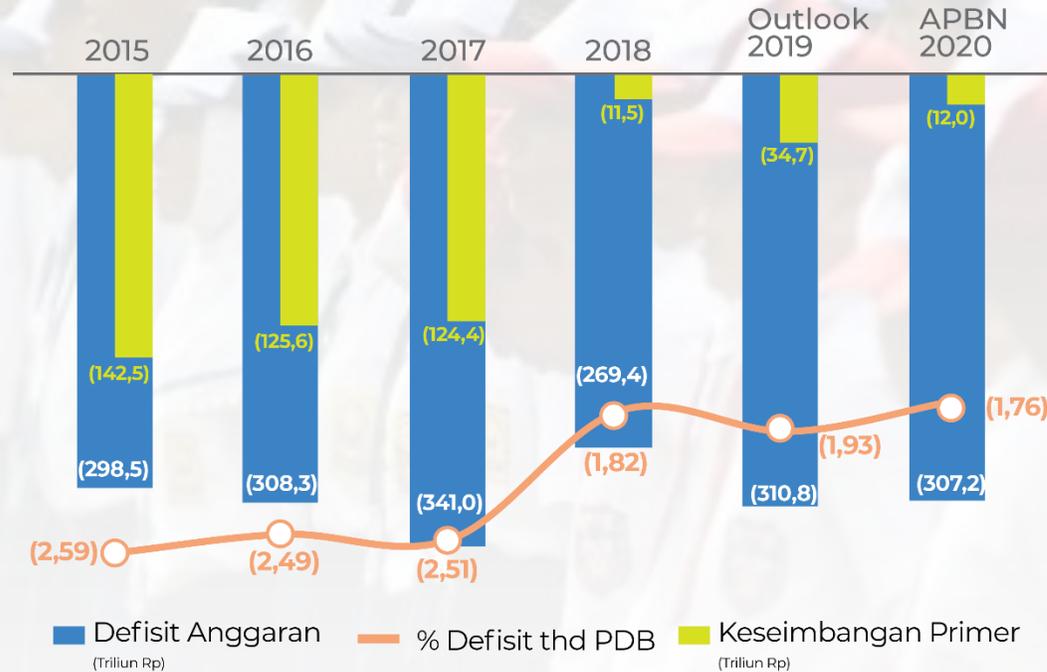
Defisit



APBN 2020 terus dijaga agar mendukung pertumbuhan namun tetap prudent

Defisit APBN Tahun 2020 dijaga 1,76% PDB diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian

Optimalisasi penerimaan negara disertai dengan target yang realistis



Tax Ratio



- ❑ Rasio defisit terhadap PDB tahun 2020 terendah dalam lima tahun terakhir
- ❑ Defisit Kesimbangan Primer diturunkan bertahap ke arah positif
- ❑ Penerimaan perpajakan untuk mendukung daya saing
- ❑ Belanja Negara semakin fokus pada program yang produktif
- ❑ Pembiayaan anggaran semakin menurun dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan daya saing



Kebijakan Penerimaan Negara

Optimalisasi penerimaan negara disertai dukungan terhadap perekonomian, dunia usaha melalui insentif fiskal, dan peningkatan layanan kepada masyarakat

Kebijakan Perpajakan

 Meningkatkan kepatuhan wajib pajak

 Ekstensifikasi barang kena cukai dan Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau

 Mengurangi tingkat penyelundupan dan Pengembangan/ perluasan fasilitas KITE dan IKM

 PPh dan PPN menjadi instrumen yang mendukung iklim investasi dan daya saing

Legal

 Perbaiki kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan

 Implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan (AEoI)

 Menurunkan dwelling time/waktu bongkar muat kapal

Administrasi

Kebijakan PNB



Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien

- Penyempurnaan regulasi dan kontrak.
- Efisiensi kegiatan.
- Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan.



Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif

- Mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha.
- Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).



Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU

- Mempertimbangkan cashflow BUMN dan kemampuan keuangan BUMN.
- Pengembangan usaha dan penugasan Pemerintah.
- Pelayanan BLU yang lebih profesional.



Penyempurnaan Tata Kelola

- implementasi UU PNB dan penyempurnaan regulasi pelaksanaan UU PNB.
- Perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan.



Insentif Fiskal untuk Mendorong Investasi

Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong investasi melalui fasilitas perpajakan dan bea dan cukai

Insentif Fiskal dalam *pipeline*:

- **Super Deduction Padat Karya**

Mendorong Peran Swasta dalam Investasi Padat Karya

- **Omnibus Law**

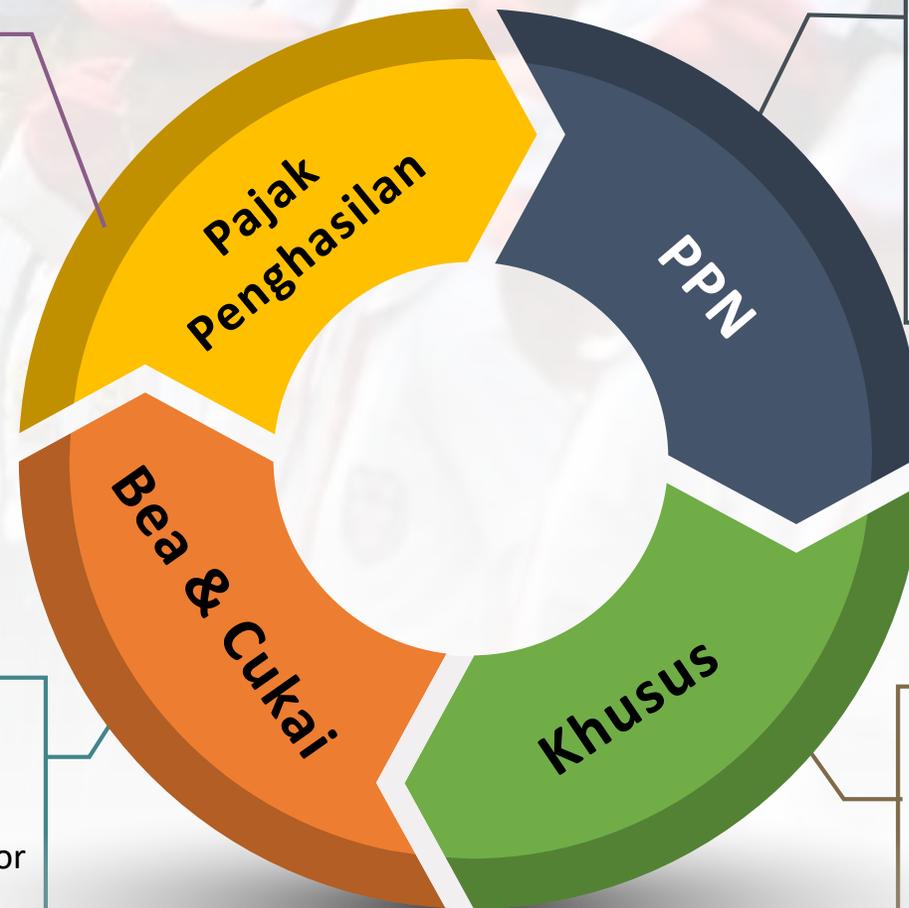
Mendorong Investasi dan dunia usaha melalui penurunan tarif PPh badan

Fasilitas Pajak Penghasilan

- Tax Holiday
- Tax Allowance
- Pengurangan pajak penghasilan impor
- Super Deduction untuk R&D and vocational training

Fasilitas Bea & Cukai

- Pembebasan bea masuk impor untuk barang modal KITE
- Bonded Storage Area
- Bea masuk ditanggung pemerintah



Fasilitas PPN

- Pengurangan PPN:
- Barang Modal
- Pelayanan kesehatan dan Pendidikan
- Pelayanan Sosial
- Jasa ekspor

Fasilitas Khusus

- Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Fasilitas di kawasan industri
- Free Trade Zone

Fokus Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah → efisien dan efektif

01

SDM yang berkualitas

- Peningkatan produktivitas/daya saing SDM
- Perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, *entrepreneurship*, ICT, penelitian
- Percepatan pengurangan stunting, promotif preventif, program jaminan kesehatan nasional

Anggaran Pendidikan Rp508,1 T

Anggaran Kesehatan Rp132,2 T



03

AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor
- Mendukung transformasi industrialisasi
- Mendorong skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP)

Anggaran Infrastruktur Rp423,3 T

02

PENGUATAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Mengakselerasi pengentasan kemiskinan
- Peningkatan akurasi data dan perbaikan penyaluran,
- Sinergi/sinkronisasi antar program
- Subsidi yang tepat sasaran dan efektif

Anggaran Perlindungan Sosial Rp372,5 T

05

ANTISIPASI KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL & DOMESTIK

- Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, dan pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan
- Penguatan cadangan risiko fiskal

04

BIROKRASI YANG EFISIEN, MELAYANI, DAN BEBAS KORUPSI

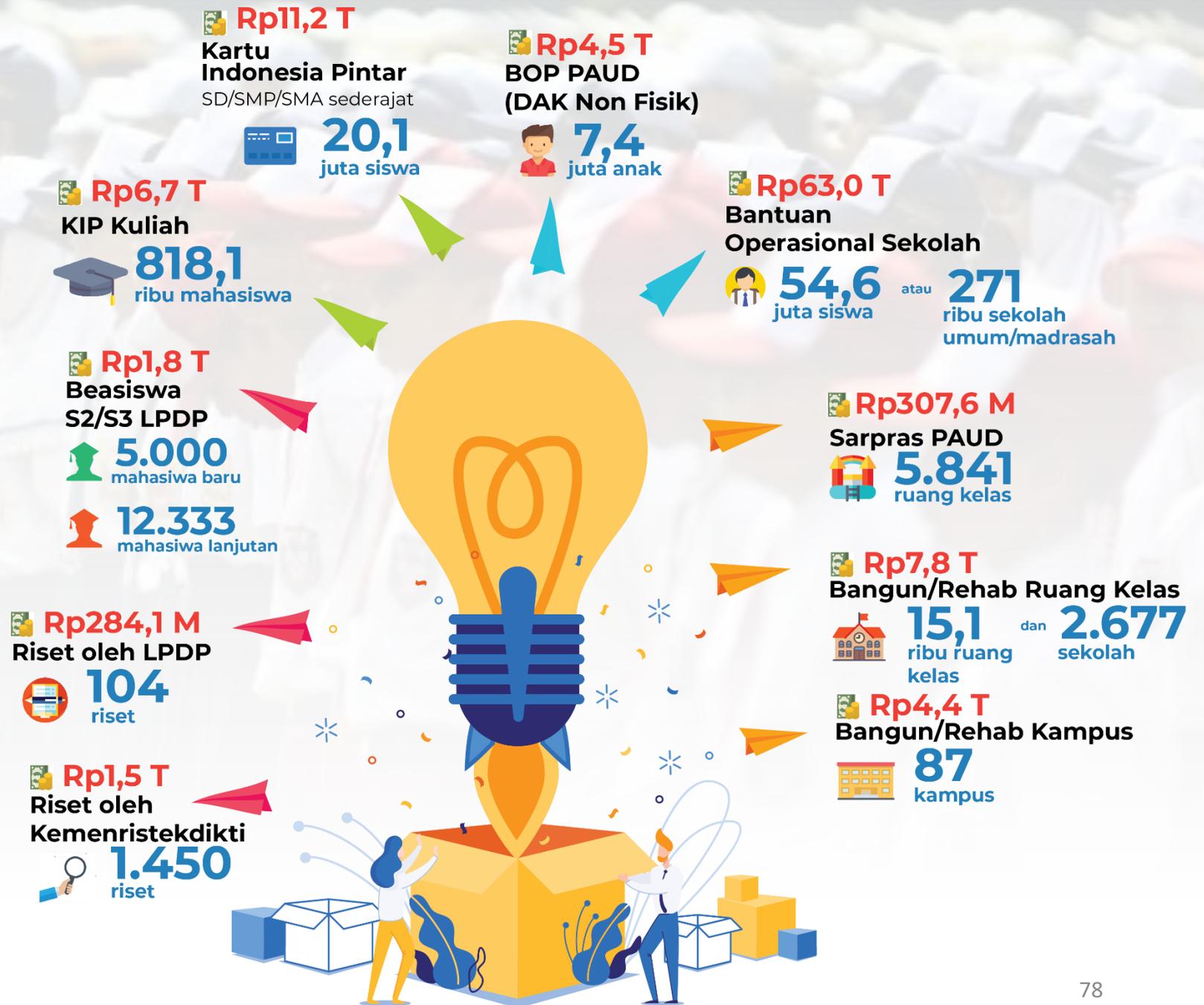
- Mendorong efektivitas birokrasi
- Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan
- Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT

Anggaran Birokrasi Rp261,3 T

APBN untuk mempersiapkan generasi muda untuk peningkatan kualitas SDM

diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat

Anggaran Pendidikan
Rp508,1 T



Anggaran Infrastruktur

Untuk membangun infrastruktur dan daerah terpencil

Rp423,3 T

Investasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur (BUMN dan BLU),a.l:

- **PT HK Rp3,5 T** --> membangun jalan tol ruas Pekanbaru – Dumai dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung
- **PT PLN Rp5,0** --> mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020
- **PT SMF Rp2,5 T** --> mendukung pembiayaan 102.500 unit rumah bagi MBR pada program KPR FLPP, serta membiayai 17.000 unit rumah pada program KPR SMF pasca bencana dan program KPR SMF bagi ASN/TNI/Polri
- **BLU LMAN Rp10,5 T** --> pembebasan lahan PSN untuk 19 proyek jalan tol, lima proyek infrastruktur sumber daya air, dan dua proyek infrastruktur perkeretaapian
- **PPDPP Rp9,0 T** --> pembiayaan dalam bentuk KPR FLPP sekitar 102.500 unit rumah MBR



Pembangunan jaringan internet (Palapa ring satelit):

- Palapa Ring 57 kabupaten/kota
- BTS (sinyal BAKTI) 2.100 Last Mile
- Layanan akses internet 5.950 lokasi

49 unit
Pembangunan Bendungan

18.758 m
Pembangunan Jembatan
(KL: 6.883 m TKDD: 11.875 m)

19.879 ha
Pembangunan Daerah Irigasi

Fasilitas air minum dan sanitasi

- SPAM Jaringan Perpipaan --> **113.282 SR**
- SPAM Perpipaan --> **236.597 SR**
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat --> **506 unit IPAL dengan 838 SR**
- Sarana dan prasarana pengelolaan sampah **102 Unit**

3 Bandara

Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur Kereta Api
238,8 (km'sp)

Jalan
6.346 km
(KL: 837 km TKDD: 5.509 km)

Perumahan untuk MBR

Rusun --> 5.224 unit
Rumah Khusus --> 2.000 unit



APBN Tahun 2020 untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Miskin dan Rentan Miskin

Rp372,5 T



Peningkatan Kesejahteraan

- Program Keluarga Harapan **Rp29,1 T**
10,0 juta keluarga miskin
- Bantuan Pangan/Kartu Sembako **Rp28,1 T**
15,6 juta keluarga miskin



Mendukung Pengembangan Perekonomian Desa

- Dana Desa **Rp72,0 T** untuk 74.954 desa termasuk:
 - 20.588 desa tertinggal
 - 6.835 desa sangat tertinggal



Peningkatan Produktivitas Pertanian

- Subsidi Pupuk **Rp26,6 T** bagi 16,2 juta petani



Pemberdayaan Masyarakat

- Pembiayaan Ultra Mikro **Rp1,0 T** bagi 241 rb debitur (1,6 juta debitur akumulasi)
- Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat **Rp13,8 T** bagi 16,47 juta debitur (akumulasi)
- Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif **Rp270 M** bagi 135 ribu KK
- Bantuan untuk Nelayan a.l. Premi Asuransi **Rp33,0 M** untuk 170 rb nelayan



Akses Perumahan

- Subsidi Uang Muka Perumahan **Rp600 M** bagi 150 rb Keluarga (MBR)
- Subsidi Bunga Kredit Perumahan **Rp3,9 T** bagi 677 rb Keluarga (MBR)

APBN untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia

Melalui K/L:



Penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN **96,8 juta jiwa (Rp 48,8 T)**



Perluasan lokasi prioritas program penurunan prevalensi stunting pada **260 kabupaten/kota**, dengan target prevalensi stunting pada balita sebesar **27,1 persen**



Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sebanyak **233 FKTP**



Penugasan tenaga kesehatan **sebanyak 2.700 orang** ke daerah-daerah tertinggal



Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi **824.600 balita kurus**



Imunisasi bayi usia 0-11 bulan mencapai **1,8 juta bayi**



Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi **466.450 ibu hamil** kurang energi kronik (KEK)



Melalui TKDD



Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar **6.452 Puskesmas**



Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan **642 Rumah Sakit (RS)**



Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional **44 RS**



Bantuan Operasional Kesehatan **9.993 Puskesmas**



Bantuan Operasional KB untuk **18.001 faskes di 7.144 kecamatan**



Pembangunan RS Pratama **12 Kab/kota**

APBN untuk mempersiapkan generasi muda untuk peningkatan kualitas SDM

diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat



DPPN Rp18,0 T

- Program beasiswa untuk sekitar 5.000 orang mahasiswa baru
- pembiayaan penerima beasiswa yang masih studi untuk 12.333 orang mahasiswa
- mendanai 104 riset



Dana Abadi Penelitian Rp5,0 T

- meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM terkait riset yang mampu berkompetisi secara global
- meningkatkan relevansi dan produktivitas riset serta peran pemangku kepentingan dalam kegiatan riset
- Meningkatkan kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional



Dana Abadi Kebudayaan Rp1,0 T

menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya



Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp5,0 T

pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam mewujudkan perguruan tinggi di Indonesia menuju *World Class University*

Investasi Pembiayaan
Rp29,0 T

APBN untuk mempersiapkan generasi muda juga melalui pelatihan kerja

diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat

Total anggaran

Rp10 T

target
2 juta
peserta



Digital: 1,5 juta

•Reguler: 0,5 juta

Kartu Pra Kerja

Merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (*skilling* dan *re-skilling*) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja.

Bertujuan untuk peningkatan produktivitas pencari kerja, dengan inovasi implementasinya melalui platform (digital) bagi pencari kerja (khususnya anak muda) dan yang sedang bekerja (alih profesi/korban PHK)

Skilling

Sasaran : pencari kerja *fresh graduate*
Tujuan : *skill adjustment*, pembekalan *vocational skill* untuk bekerja
Outcome : mengurangi penganggur

Re-Skilling

Sasaran : alih profesi, pekerja ter-PHK, atau berpotensi ter-PHK
Tujuan : pembekalan *vocational skill* yang berbeda/ baru untuk alih profesi/ wirausaha
Outcome : mencegah pengangguran kembali

Desain Implementasi

Digital

Pelatihan+insentif

Peserta memilih jenis pelatihan melalui platform digital (GoJek, Tokopedia, Jobstreet dll). Pelatihan disediakan oleh swasta*

▶ Pelatihan *Online* (e-learning) dan *Offline* (tatap muka)

*lembaga pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan PMO

Regular

Pelatihan + Sertifikasi + Insentif

Pelatihan dan Sertifikasi di LPK Pemerintah (termasuk BLK), LPK Swasta, dan TC

▶ Pelatihan *Offline* (tatap muka)

*tahap pengembangan selanjutnya

Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas dilakukan melalui sinergi lintas K/L dan Pemda

(1) Danau Toba



(3) Labuan Bajo



(4) Mandalika



(5) Likupang



Sumber gambar: persona.travel

Terdapat tambahan destinasi pariwisata, dari sebelumnya 4 destinasi (sebagaimana disampaikan dalam Pidato Pengantar RAPBN) menjadi 5 destinasi

1. Pariwisata → sektor utama pembangunan nasional (visi Indonesia 2015-2045)
2. Arahkan Presiden → infrastruktur di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang) **dituntaskan tahun 2020** : tata ruang, akses dan konektivitas, fasilitas di destinasi wisata, SDM, produk lokal, dan promosi terintegrasi → sinergi lintas K/L dan Pemda
3. Alokasi anggaran tahun 2020 Rp10,17 T → meningkat 6 kali lipat dari alokasi 2019 (Rp1,69 T)
4. Target Kinerja Kemenpar Tahun 2020, a.l. :
 - Kontribusi PDB Nasional 4,8%
 - Devisa sebesar USD 19-21 Milyar
 - Kunjungan Wisman 18,5 juta orang dan Wisnus 312 juta orang
 - Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata sebanyak 13 juta orang

K/L yang terlibat, a.l:

Rp10,17 T

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Kemen PUPR → Rp7,8 T | 5. Kemen ESDM → Rp0,05 T |
| 2. Kemenhub → Rp1,02 T | 6. Kemendes PDPTT → Rp0,08 T |
| 3. Kemenpar → Rp1,0 T | 7. Kemendikbud → Rp0,05 T |
| 4. KLHK → Rp0,15 T | 8. Bekraf → Rp0,02 T |

Catatan: anggaran di atas merupakan anggaran untuk pengembangan 10 destinasi wisata prioritas

Desentralisasi Fiskal Melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

DTU

**Dana Transfer Umum
Rp544,7 T**

Diserahkan ke daerah, dilaksanakan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah

DTK

**Dana Transfer Khusus
Rp202,5 T**

Dilaksanakan oleh daerah dengan control, monitoring dan evaluasi dari masing-masing K/L Pengampu

**Dana
Desa**

Rp72,0 T

Dilaksanakan oleh Desa dengan arahan penggunaan, monitoring dan evaluasi dari kemendes PDTT dan kemendagri

PUSAT

- Alokasi
- Evaluasi APBD
- Monev
- Reward & Punishment

DAERAH

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pertanggung jawaban

PUSAT

- Penilaian
- Susun Juknis/
Jukop
- Monev

**S
I
N
K
R
O
N
I
S
A
S
I**

DAERAH

- Pengusulan
- Pelaksanaan
- Monev
- Pertanggung jawaban

PUSAT

- Alokasi
- Arahan Penggunaan
- Monev

DAERAH

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pertanggung jawaban

Target Output Dana Transfer Khusus TA 2020

Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK



KEMENDIKBUD & DIKTI PENDIDIKAN

- 14.392 Ruang kelas
- 7.968 perpustakaan sekolah
- 6.779 Laboratorium dan Ruang Praktik



KEMENKES & BKKBN KESEHATAN DAN KB

- Kesehatan Dasar 6.452 Puskesmas dan 642 RS
- 258 unit Puskesmas DTPK
- 12 Kab/kota Pembangunan RS Pratama
- 18 unit Puskesmas Pariwisata



JALAN

Pemeliharaan/Peningkatan/
Pembangunan Jalan 5.971 Km



IRIGASI

Rehabilitasi dan
Pembangunan Irigasi 167.755
Ha

KEMENTERIAN PUPR



AIR MINUM

Jaringan Air Minum 549.266
Sambungan Rumah



SANITASI

177.401 Tangki Septik
838 Sambungan Rumah
42 Truk Tinja



PERUMAHAN PERMUKIMAN

Pembangunan/peningkatan kualitas rumah
49.266 unit

Target Output Dana Transfer Khusus TA 2020

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

KEMENDIKBUD & DIKTI

- Bantuan Operasional Sekolah
 45,9 juta
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
 7,4 juta anak
- Tunjangan Profesi Guru
 1,2 jutaguru
- Tambahan Penghasilan Guru
 183 ribu guru
- Tunjangan Khusus Guru
 38 ribu guru
- BOP Pendidikan Kesetaraan
 2882 ribu orang
- BOP Museum dan Taman Budaya
 106/20 (museum/taman budaya)

KEMENKES & BKKBN

- Bantuan Operasional Kesehatan
 9.993 Puskesmas, 5.976 Sarana Pelayanan Farmasi dan 18.919 Industri Rumah Tangga Pangan
- Bantuan Operasional KB
 25.517/18.001/7.144 (balai penyuluhan KB/faskes/kec)

KEMENKOP&UKM

- Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
 63.570 peserta dan 835 pendamping

KEMENDAGRI

- Pelayanan Administrasi Kependudukan
 34 Prov dan 508 Kab/Kota

KEMENPAR

- Pelayanan Kepariwisata
 103.720/73 (peserta pelatihan/Tourist Inform Center)

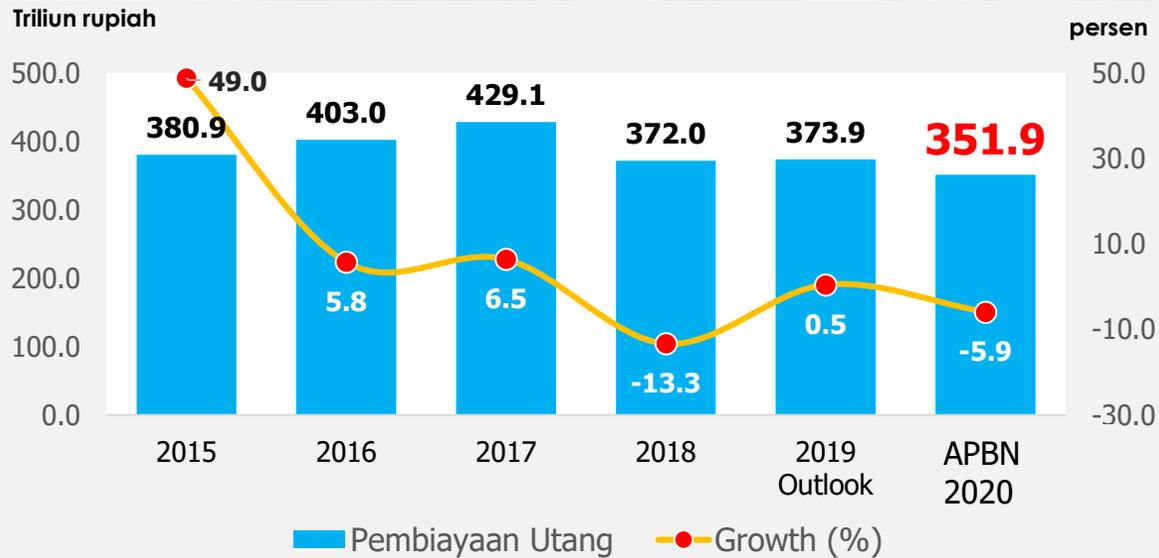
KEMENLHK

- Bantuan BLPS
 Kota yang telah mengoperasikan PLTSa sesuai Perpres No.35/2018

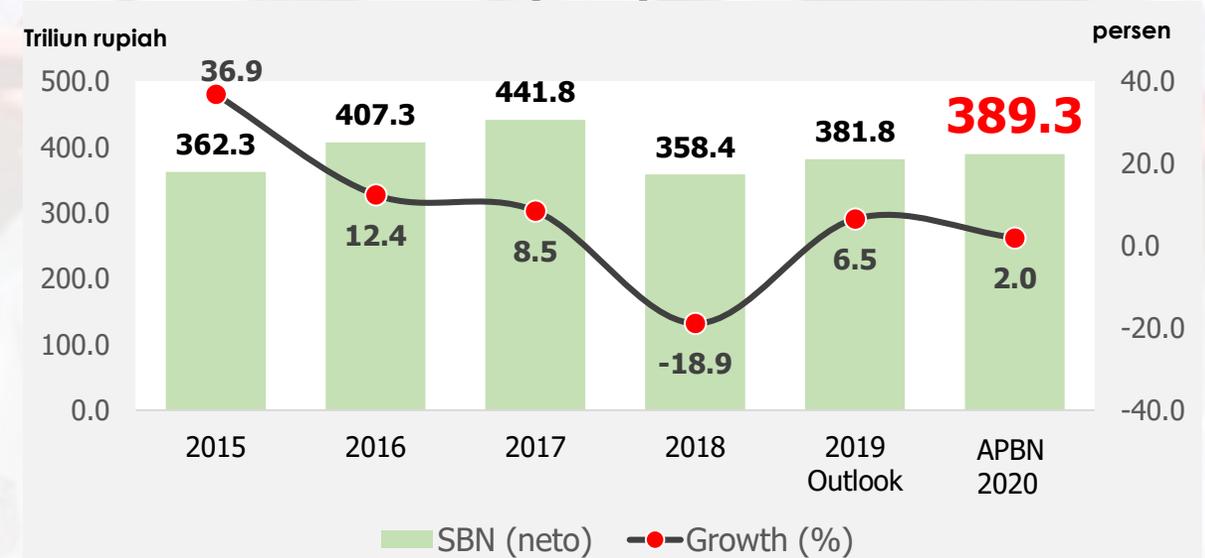
Kebijakan Pokok Pembiayaan Utang

pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik

Pembiayaan Utang



SBN (neto)



Arah Kebijakan Pembiayaan Utang

Prudent

- **pengendalian rasio utang** dalam batas aman berkisar 29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal
- Menjaga keseimbangan makro dengan **menjaga komposisi utang domestik dan valas** dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan



Strategi Pembiayaan Utang

- **Mengoptimalkan peran serta masyarakat** dalam pasar obligasi domestik (*financial deepening*)
- **Pengelolaan utang secara aktif** melalui manajemen kewajiban dan aset.

Selain melalui belanja APBN, Swasta digandeng untuk peningkatan kualitas SDM melalui instrumen pajak untuk mendorong daya saing

Insentif Baru: *Super Deduction* (PP 45 Tahun 2019)

R&D



300%

Pengurangan pendapatan kotor paling banyak 300% dari biaya aktivitas R&D activities yang dilakukan di Indonesia

Pelatihan
Vokasional



200%

Pengurangan pendapatan kotor paling banyak 200% dari total biaya aktivitas vokasional.

Proyek Padat
Karya



60%

Pengurangan pendapatan bersih sebesar 60% dari total investasi untuk industri padat karya.

KEY TAKEAWAYS

- Untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan, Pemerintah berusaha untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045
- Usaha untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045 tidaklah mudah, apalagi usaha tersebut berada ditengah-tengah situasi global yang tidak menentu dan tantangan structural lainnya.
- Kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen ***counter-cyclical*** yang digunakan tidak hanya meredam dampak dari pelemahan global namun juga untuk memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang



TERIMA KASIH